LAPORAN KINERJA

BPPMHKP AMBON

2024

KATA PENGANTAR

Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja dari pelaksanaan tugas dan berfungsi antara lain sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai KIPM Ambon menuju terwujudnya *good governance,* dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat, disisi lain merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Balai KIPM Ambon. Kinerja Balai KIPM Ambon diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja yang merupakan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kepala Balai KIPM Ambon Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan bahkan ada yang melebihi dari target yang telah di tetapkan, ini dikarena capaian indikator kinerja secara keseluruhan sangat dipengaruhi oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen pemangku kepentingan sebagai bagian integral yang tidak dapat dipisahkan.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang disampaikan melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi dan peningkatan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja Balai KIPM Ambon dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Goverment*.

Ambon, 12 Januari 2025
Kepala,

Muhammad Hatta Arisandi, S.St.Pi., M.Si
NIP. 19800527 200312 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sejalan dengan terbitnya Peraturan Presiden No. 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka terjadi perubahan nomenklaltur pada salah-satu unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMKHP), yang sekarang menjadi *Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP)*. Perpres ini diperkuat juga dengan terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, namun sampai dengan LKj ini dibuat, Peraturan Menteri KKP terkait Organiasai dan Tata Kerja UPT BPPMHKP belum terbit, sehingga UPT masih menggunakan nomenklatur yang lama.

Pada tahun 2024, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon (Balai KIPM Ambon) mengalami dua kali perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) pasca terbitnya Perpres 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pada Triwulan I, II dan III Balai KIPM Ambon bertanggung jawab mewujudkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 17 (tujuh belas) Indikator Kinerja Utama, sedangkan pada Triwulan IV Balai KIPM Ambon diamanahkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dan 14 (empat belas) Indikator kinerja Utama.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada Tahun 2024 sebesar 111,49%. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Ambon yang telah ditetapkan dengan hasil sebagai berikut:

1. Pada Triwulan I – III, 17 Indikator Kinerja Utama yang menjadi Target kinerja Balai KIPM Ambon di tahun 2024 semuanya tercapai bahkan ada yang melebihi dari target.
2. Pada Triwulan IV, dengan adanya perubahan Indikator Kinerja Utama, yang awalnya 17 IKU menjadi 14 IKU, dan semua indikator kinerja itu dinyatakan memenuhi dan ada yang melebihi target.
3. Indikator kinerja yang memenuhi dan melebihi target yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:
   1) Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon, dari target 70% tercapai 100%
   2) Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon, dari target 70% tercapai 100%
   3) Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Ambon, dari target 70% tercapai 100%
   4) Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon, , dari target 99% tercapai 100%
   5) Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Ambon, dari target 70% tercapai 83,10%
   6) Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Ambon, dari target nilai indeks 3,36 tercapai nilai indeks 4,00
   7) Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Ambon dari target nilai indeks 86,00 tercapai nilai indeks 89,30
   8) Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Ambon, dari target nilai 82,00 tercapai 83,75
   9) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon dari target nilai 71,00 tercapai nilai 85,00

10) Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Ambon dari target nilai 93,76 tercapai nilai 96,53
11) Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Ambon dari target 100 % tercapai 100 %
12) Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon dari target 80 % tercapai 100 %
13) Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup UPT Balai KIPM Ambon dari target 80 % tercapai 100 %
14) Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Balai KIPM Ambon dari target 80 % tercapai 84,34 %

Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-032.13.2.649750/2024 Tanggal 30 November 2024 setelah direvisi sebesar Rp.5.396.566.000,- (*lima milyar tiga ratus sembilam puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*). Anggaran tersebut sudah termasuk untuk penyelengaraan kegiatan yang dibiayai oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.34.510.000,- *(tiga puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupah)*. Pencapaian realisasi anggaran tahun 2024 tersebut terdiri atas realisasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp.2.543.454.38,- atau 99.58%, realisasi anggaran belanja barang sebesar Rp.2.803.653.762,- atau 98,64% dan di tahun 2024 ini Balai KIPM Ambon tidak tersedia anggaran untuk belanja moda

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I

RINGKASAN EKSEKUTIF II

DAFTAR ISI 1

DAFTAR TABEL 2

DAFTAR GAMBAR 4

DAFTAR LAMPIRAN 6

BAB I PENDAHULUAN 7

1.1 LATAR BELAKANG 7

1.2 KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI BALAI KIPM AMBON 10

1.3 SASARAN, INDIKATOR DAN TARGET KINERJA 13

BAB II CAPAIAN KINERJA 17

1.1 ANALISIS DAN EVALUASI 19

2.1 REALISASI ANGGARAN 74

BAB III PENUTUP 75

3.1 KESIMPULAN 75

3.2 REKOMENDASI 76

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Balai KIPM Ambon Tahun 2024 15
Tabel 2. Capaian dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Balai KIPM Ambon 18
Tabel 3. Data Ukuran Kapal dan Pelabuhan Bongkar 22
Tabel 4. Target dan capaian IKU 1 Tahun 2024 25
Tabel 5. Target dan Realisasi IKU 1 Tahun 2024 25
Tabel 6 Realisasi IKU 2 Tahun 2024 28
Tabel 7. Target dan Realisasi IKU 2 pada Tahun 2024 28
Tabel 8. Target dan capaian IKU 3 Tahun 2024 31
Tabel 9. Target dan Realisasi IKU 3 Tahun 2024 31
Tabel 10. Capaian IKU 4 dan Target Tahun 2024 36
Tabel 11. Target dan Realisasi IKU 4 Tahun 2024 36
Tabel 12. Capaian IKU 5 dan Target Tahun 2024 40
Tabel 13. Target dan Realisasi IKU 5 Tahun 2024 40
Tabel 14. Capaian IKU 6 dan Target pada tahun 2024 43
Tabel 15. Target dan Realisasi IKU 6 pada Tahun 2024 44
Tabel 16. Capaian IKU 7 dan Target Tahun 2024 48
Tabel 17. Target dan Realisasi IKU 7 Tahun 2024 49
Tabel 18. Capaian IKU 8 dan Target pada Tahun 2024 50
Tabel 19. Target dan Realisasi IKU 8 pada Tahun 2024 50
Tabel 20. Capaian IKU 9 dan Target pada Tahun 2024 52
Tabel 21. Target dan Realisasi IKU 9 pada Tahun 2024 52
Tabel 22. Capaian IKU 10 dan Target pada Tahun 2024 62
Tabel 23. Target dan Realisasi IKU 10 pada Tahun 2024 62
Tabel 24. Capaian IKU 11 dan Target pada Tahun 2024 63
Tabel 25. Target dan Realisasi IKU 11 pada Tahun 2024 63

Tabel 26. Capaian IKU 12 dan Target pada Tahun 2024 69
Tabel 27. Target dan Realisasi IKU 12 pada Tahun 2024 69
Tabel 28. Capaian IKU 13 dan Target pada Tahun 2024 71
Tabel 29. Target dan Realisasi IKU 13 pada Tahun 2024 71
Tabel 30. Capaian IKU 14 dan Target pada Tahun 2024 73
Tabel 31. Target dan Realisasi IKU 14 pada Tahun 2024 74
Tabel 32. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja 75
Tabel 33. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Tahun 2024 75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Ambon 11
Gambar 2. Peta Strategi Balai KIPM Ambon 14
Gambar 3. Nilai NPSS Balai KIPM Ambon pada Aplikasi KINERJAKU 18
Gambar 4. Kegiatan Inspeksi CPIB Kapal di PT. Peduli Laut Maluku 23
Gambar 5. Kegiatan Inspeksi Sertifikasi CPIB Pembenihan 24
Gambar 6. Surveilan Penerapan HACCP 27
Gambar 7. Dialoga peran BPPMHKP Ambon dalam peneraparan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Provinsi Maluku 29
Gambar 8. Monitoring Kesegaran ikan dalam rangka Natal dan Tahun Baru 2025 di Pasar Mardika Ambon 30
Gambar 9. Penyerahan sertifikat HACCP dan Sertifikat Traceability 33
Gambar 10. Kegiatan stuffing ekspor yang dilaksanakan di PT. Wahana Lestari Investama 33
Gambar 11. Data Ekspor Tahun 2023 dan Tahun 2024 35
Gambar 12. Kegiatan survailan I SNI ISO/IEC 17020:2012 di BPPMHKP Ambon, pada tanggal 13 Agustus 2024 39
Gambar 13. Kegiatan survailan II SNI ISO/IEC 17025:2017 di BPPMHKP Ambon, pada tanggal 24 oktober 2024 39
Gambar 14. Pelayanan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada hari Libur Nasional 29 Januari 2025 41
Gambar 15. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan TW-IV 43
Gambar 16. Pelaksanaan Kegiatan Apel Integritas, Breafing Pagi dan Doa Bersama di BPPMHKP Ambon 45

Gambar 17. Hasil Capaian IKPA sesuai Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan 61
Gambar 18. Data Realisasi Belanja Per Jenis Kegiatan 78
Gambar 19. Data Indikator Pelaksanaan Anggaran Balai KIPM Ambon 79

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai KIPM Ambon .. 80
Lampiran 2. Rekapitulasi Data Inspeksi dan Sertifikasi CPIB Tahun 2024 83
Lampiran 3. Rekapitulasi Data Ruang Lingkup UPI di Balai KIPM Ambon Tahun 2024 84
Lampiran 4. Laporan Kegiatan Monev Kesegaran Ikan pada Sentra Penjualan Ikan di Kota Ambon 85
Lampiran 5. Daftar Sertifkasi Mutu dan Daftar Import Refusal Tahun 2024 91
Lampiran 6. Data Capaian IKU Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Tahun 2024 103
Lampiran 7. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 110
Lampiran 8. Capaian Index Profesionalitas ASN Balai KIPM Ambon Tahun 2024 115
Lampiran 9. Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2024 116
Lampiran 10. Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2024 118
Lampiran 11. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai KIPM Ambon Tahun 2024 119
Lampiran 12. Capaian Indikator Kinerja Utama Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawasan Eksternal BPK tahun 2024 .. 120
Lampiran 13. Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai KIPM Ambon Tahun 2024 122
Lampiran 14. Penilaian Efektifitas Pengawasan dan Kepatuhan Pelaksanaan PBJ pada Balai KIPM Ambon 123
Lampiran 15. Hasil Penilaian Tingkat Efektifitas Pengelolaan BMN Tahun 2024 127

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas. Peningkatan inovasi dan kualitas Investasi merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan mensejahterakan secara adil dan merata. Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui: 1) Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian serta pengelolaan kelautan, sumber daya air, sumber daya energi, serta kehutanan; dan 2) Akselerasi peningkatan nilai tambah agrofishery industri, kemaritiman, energi, industri, pariwisata, serta ekonomi kreatif dan digital.

Sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarustamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan

stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Sesuai dengan rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya dan keanekaragaman hayati perikanan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya pada peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran Balai karantina Ikan, pengendalian Mutu dan keamanan Hasil Perikanan Ambon dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah dengan menyelenggarakn pengedalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan. kemampuan untuk memberikan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya di sebut SISJAMU, adalah upaya untuk pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Ambon adalah salah satu unit pelaksana teknis yang merupakan perpanjangan tangan dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan, yang saat ini masih menunggu terbitnya Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Kelautan dan Perikanan terkait Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPMHKP.

Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan tugas dan fungsi yang diemban oleh Balai KIPM Ambon yaitu Unit Pelaksana Teknis yang memberikan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya di sebut SISJAMU, adalah upaya untuk pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia.

Dalam rangka mewujudkan *good governance* sebagaimana telah ditetapkan dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas Laporan Kinerja Intansi Pemerintah, yang mana mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun pelaporan kinerja.

Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja terkait dengan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan hasil Perikanan Ambon, maka disusun Pelaporan kinerja Balai KIPM Ambon.

1.2 Kedudukan, Tugas dan Fungsi Balai KIPM Ambon

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perianan, Pasal 171 menyebutkan bahwa Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyelenggarakan pengendalain dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan, dan dalam pasal 172 meyebutkan bahwa Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

a) penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
b) pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelataun dan perikanan;
c) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan;
d) pelaksanaan administrasi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan; dan
e) pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Struktur organisasi Balai KIPM Ambon sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 92/PERMEN-KP/2020. Struktur organisasi Balai KIPM Ambon dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai KIPM Ambon

1. Kepala

Balai KIPM Ambon merupakan unit pelaksana teknis Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dipimpin oleh seorang Kepala UPT Eselon III.a yang membawahi 1 (satu) Jabatan Struktural Kepala Subbagian Umum Eselon IV.a dan kelompok Jabatan Fungsional.

Kepala UPT bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. Disamping tanggung jawab tersebut, Kepala UPT melaksanakan hubungan tata kerja, antara lain:

- Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi lingkungan Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP maupun dengan instansi lain di luar Unit Pelaksana Teknis BPPMHKP sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
- Mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerima dan mengolah laporan dari bawahan untuk dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut sekaligus sebagai dasar memberikan petunjuk kepada bawahan.
- Mengadakan rapat secara berkala dalam rangka evaluasi dan pemberian bimbingan kepada bawahannya.

2. Kepala Sub Bagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, pelaporan, urusan keuangan, hubungan masyarakat, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, persuratan, kearsipan, dokumentasi, rumah tangga, serta pengelolaan barang milik negara dan perlengkapan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Dalam pelaksanaan memberikan terkait dengan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan maka ditetapkan Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan.

Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan masing-masing fungsional sesuai dengan bidang tugas Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Mutu dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

1.3 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran telah ditetapkan indikator sasaran sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan berdasarkan target yang ditetapkan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Dengan demikian, setiap tujuan yang ditetapkan memiliki indikator yang terukur.

Peta strategis Balai Karantina Ikan pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Peta Strategi Balai KIPM Ambon

Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon telah menetapkan Sasaran kegiatan dan indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis tahun

2024 dimana terdapat 3 sasaran kegiatan dan 14 indikator kinerja utama. Adapun sasaran kegiatan dan indikator kinerja utama Balai KIPM Ambon Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 1.

Sasaran dan indikator kinerja tahun 2024, dibagi menjadi 4 Triwulan, dengan sasaran kegiatan sebanyak 4 sasaran strategis, pada TW I Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon bertanggung jawab mewujudkan 7 (tujuh) indikator kinerja utama, pada TW II sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja utama, pada TW III sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja utama, dan pada TW IV sebanyak 14 (empat belas) indikator kinerja utama.

Tabel 1. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama Balai KIPM Ambon Tahun 2024

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	99

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.2	Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai stan dar	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Ambon (%)	70
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP	6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Ambon (Nilai indeks)	3,36
		7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai indeks)	86
		8	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	82
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	71
		10	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	93,76
		11	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	100
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%)	80
		13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	80
		14	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	80

BAB II
CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja adalah tahap pengukuran pencapaian indikator kinerja dan analisis hasil capaiannya. Pengukuran pencapaian indikator kinerja layaknya dilakukan melalui identifikasi peran dan tanggung jawab setiap tingkat manajemen dalam organisasi untuk selanjutnya dianalisis upaya pencapaian target kinerja unit kerja yang bersangkutan dibandingkan dengan indikator yang telah disepakati sebelumnya.

Pada tahun 2024, Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 3 (tiga) sasaran kegiatan dan 14 (empat belas) indikator kinerja utama, dengan nilai capaian dapat dilihat pada Tabel 2. Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada Tahun 2024 adalah sebesar 114,97. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Ambon. Nilai NPSS Balai KIPM Ambon pada tahun 2024 sesuai dengan aplikasi kinerjaku dapat dilihat pada gambar 3.

Gambar 3. Nilai NPSS Balai KIPM Ambon pada Aplikasi KINERJAKU

Tabel 2. Capaian dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Balai KIPM Ambon

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	CAPAIAN	%
SK.1	Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70	100	120
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70	100	120
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70	100	120
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	99	100	101
SK.2	Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup Balai KIPM Ambon (%)	70	83	118,71
SK.3	Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan BPPMHKP	6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Ambon (Nilai indeks)	3,36	4,00	119,05
		7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai indeks)	86	89,30	103,84

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	CAPAIAN	%
		8	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	82	83,75	102,13
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	71	85	119,72
		10	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	93,76	96,53	102,95
		11	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	100	100	100
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%)	80	100	120
		13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	80	84,34	105,43
		14	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	80	97,50	120

1.1 Analisis dan Evaluasi

Capaian kinerja Balai Karantina Ikan Pengendalian mutu dan Keamanan hasil perikanan Ambon pada sasaran strategis Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat, dengan sasaran kegiatan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif dengan diukur dengan menganalisis capaian indikator kinerja yang telah ditetapkan target capaiannya pada tahun 2024. Adapun hasil analisisnya disajikan pada poin bahasan berikut ini:

Sasaran Program : Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat

Sasaran Kegiatan : Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan

IKU 1	**Persentase hasil kelautan dan perikanan produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BPPMHKP Ambon (%)**

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor primer yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer perikanan budidaya meliputi CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan perikanan tangkap meliputi CPIB di kapal yang telah sesuai dengan standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sektor produksi perikanan primer merujuk kepada kegiatan yang berfokus pada pengambilan dan pengelolaan sumberdaya hayati perairan yang meliputi penangkapan ikan, budidaya dan pengumpulan hasil laut lainnya.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Output kegiatan berupa rekomendasi yang diberikan dari hasil inspeksi dalam sistem OSS maupun secara manual.

Dalam rangka mendukung program Penangkapan Ikan Terukur (PIT), BPPMHKP Ambon telah melaksanakan kegiatan Inventarisasi data kapal penangkap/penampung pada tanggal 28 – 30 November 2024 di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tual dalam rangka sertfikasi CPIB dan sertifikasi HACCP. Pembinaan dan Sertifikasi CPIB Kapal, Pembinaan dan Sertifikasi HACCP Kapal, pembinaan dan Sertifikasi Catch Certificate (CC), sistem ketertelusuran (traceability), penggunaan Kapal dan Alat Penangkapan Ikan (KAPI) yang ramah lingkungan.

Pelaksanaan uji coba penangkapan ikan terukur (PIT) resmi dimulai di zona III PIT tepatnya di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718. Pelaksanaan modeling PIT menerapkan penangkapan ikan yang berkelanjutan dan ekosistem bisnis hulu-hilir sehingga diperlukan penjaminan mutu dan keamanan produk perikanan untuk menghasilkan produk perikanan yang memenuhi standar mutu yang menjadi persyaratan Negara pengimpor.

Untuk itu Balai Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan melakukan pendataan Armada tangkap dan penampung dalam rangka mitigasi proses penjaminan mutu produk hasil perikanan melalui sertifikasi Cara Penanganan Ikan Yang Baik diatas kapal (CPIB).

Armada tangkap dan kapal penampung yang beroperasi pada Zona III, WPP 718 dengan jumlah 957 kapal, terdiri dar 779 kapal bertonase ≥30 GT dan 178 kapal bertonase 10-30 GT. Sebaran kapal diberbagai pelabuhan zona III, antara lain Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual,

Pelabuhan Perikanan Pantai Dobo, Pelabuhan Benjina dan Pelabuhan Pantai Ukurlarang Tanimbar. Adapun Data Ukuran Kapal dan Pelabuhan yang sudah Tersertifikasi CPIB dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini dan Sertifikasi CPIB Kapal dapa diihat pada Gambar 4.

Tabel 3. Data Ukuran Kapal dan Pelabuhan Bongkar

NO	PELABUHAN BONGKAR	GROSS TONNAGE (GT)		SERTIFIKASI CPIB	KETERANGAN
		10-30	≥30		
1.	PPN TUAL	16	102	20	Sertifikat CPIB Aktif
2.	PPP DOBO	151	677	-	-
3.	PPP UKURLARAN (TANIMBAR)	12	-	-	-
Jumlah		**179**	**779**	**20**	**-**

Gambar 4. Kegiatan Inspeksi CPIB Kapal di PT. Peduli Laut Maluku

Selaian itu Pada tahun 2024 Balai KIPM Ambon telah melakukan Kegiatan Inspeksi dan Surveillance pada unit Budidaya antara lain CBIB,CPIB,CPPIB,CPOIB, CDOIB dan CPIB Kapal ditahun 2024 yaitu menerbitkan sertifikat CPIB 2 (dua) tambak pembenihan yakni pada PT. Wahana Lestari Investama di Kabupaten Maluku Tengah dan BBIAT Mako Kabupaten Pulau Buru dan 5 (lima) inspeksi sertifikasi kapal tangkap yakni KM. Maya Mandiri 17, KM. Maya Mandiri 15, KM. Maya Mandiri 12, KM. Maluku Prima Makmur 128 dan KM. Maluku Prima Makmur 02. Adapun sertifikasi CPIB Pembenihan dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Kegiatan Inspeksi Sertifikasi CPIB Pembenihan

Kegiatan sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Penanganan Ikan yang Baik di atas Kapal telah diterbitkan sertifikasi sehingga realisasi indikator kinerja ini sebesar 100% dari target 70% sehingga capaian terhadap target sebesar 142,86%.

Realisasi indikator jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebanyak 10 sertifikasi dengan persentase capaian 100% dan realisasi tahun 2023 sebanyak 11 sertifikasi dengan persentase capaian 100%, maka capaian tahun 2024 sama dengan tahun 2022 dan 2023.

Jika capaian indikator kinerja Persentase hasil kelautan dan perikanan produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BPPMHKP Ambon dibandingkan dengan target pada rencana strategis BPPMHKP Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 142,86%.

Berikut ini ditampilkan Target, realisasi dan capaian pada IKU 1 tahun 2024 sebagaimana table 4 dan table 5, berikut ini :

Tabel 4. Target dan capaian IKU 1 Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	% Thd Target
Persentase hasil kelautan dan perikanan produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BPPMHKP Ambon	70%	100%	142,86%

Tabel 5. Target dan Realisasi IKU 1 Tahun 2024

SP.1	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat								
IK.1	Persentase hasil kelautan dan perikanan produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BPPMHKP Ambon								
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi terhadap target thn 2024	Target	% Capaian Terhadap Target Renstra
-	-	-	100%	100%	70%	100%	142,86	70%	142,86

IKU 2	Persentase hasil kelautan dan perikana sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon

Presentase Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Pasca Panen yang memenuhi Standar Mutu dan Keamanan Pangan adalah ukuran dalam menilai seberapa besar volume atau jumlah produk hasil kelautan dan perikanan sektor Produksi Pasca Panen meliputi: PMMT/HACCP dan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang telah sesuai dengan

standar, kriteria keamanan pangan yang ditetapkan oleh Otoritas Kompeten.

Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan adalah upaya pencegahan dan pengendalian yang harus diperhatikan dan dilakukan sejak pra produksi sampai dengan pemasaran untuk menghasilkan hasil kelautan dan perikanan yang bermutu dan aman bagi kesehatan manusia. Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan dicapai melalui penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Sektor produksi Pasca Panen merujuk kepada rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah ikan atau hasil perikanan ditangkap dengan tujuan untuk meningkatkan nilai, menjaga kualitas, memperpanjang umur simpan produk perikanan yang meliputi Penanganan, Pengolahan, Distribusi, hingga pemasaran produk perikanan.

Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan mengacu kepada:

1. Standar Nasional Indonesia (SNI);
2. Standar Internasional (Codex Alimentarius);
3. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku.

Sertifikat Penerapan PMMT/HACCP dan SKP yang diterbitkan berdasarkan ruang lingkup produk, jenis olahan ikan, unit proses, dan/atau potensi bahaya (hazard) yang berbeda yang ditangani dan/atau diolah.

Pada tahun 2024 sertifikasi penerapan PMMT/HACCP dan SKP dilaksanakan pada 17 Unit Pengolahan Ikan di Provinsi Maluku yakni

terdapat 40 ruang lingkup HACCP dan 8 Sertifikasi Kelayanan Pengolahan Ikan,sertifikasi

penerapan HACCP dan SKP telah terbit sesuai dengan target yang direncanakan sehingga realisasi mencapai 100% dari target target indikator sebesar 70%, maka persentase capaian terhadap target sebesar 142,86%. Pelaksanaan sertifikasi HACCP dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Surveilan Penerapan HACCP

Capaian indikator ini jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 sebesar 175% maka terjadi persentase penurunan sebesar 43%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 130% maka persentase penurunan sebesar 23% dan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 maka persentase penurunan sebesar 13,04%.

Capaian indikator persentase hasil kelautan dan perikanan produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BPPMHKP Ambon dibandingkan dengan target pada

rencana strategis BPPMHKP Ambon 2020-2024 maka persentase realisasi indikator ini mencapai 142,86%. data dukung indikator kinerja ini berupa rekapitulasi sertifikasi ruang lingkup HACCP dan rekapitulasi sertifikasi SKP tertera pada lampiran 3.

Capaian indikator persentase hasil kelautan dan perikanan produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BPPMHKP Ambon dapat dilihat pada tabel 6 dan 7 sebagai berikut:

Tabel 6 Realisasi IKU 2 Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	% Thd Target
Persentase hasil kelautan dan perikanan produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BPPMHKP Ambon	70%	100%	142,86%

Tabel 7. Target dan Realisasi IKU 2 pada Tahun 2024

SP.1	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat								
IK.2	Persentase hasil kelautan dan perikanan produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup BPPMHKP Ambon								
RealisasiTahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
2019	2020	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	Target thn 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi terhadap target thn 2024	Target (%)	% Capaian terhadap target Renstra
-	-	175,00	130,00	115,00	70,00	100,00	142,86	70,00	142,86

IKU 3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Ambon

Pengawasan mutu adalah semua kegiatan yang meliputi bimbingan fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan

keamanan hasil perikanan. Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI merupakan nilai Pengawasan Mutu hasil KP di wilayah RI yang meliputi pengawasan implementasi dari terbitnya Inpres 01 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dan melalui monitoring terhadap cemaran marine biotoxin dan/atau cemaran kimia berbahaya yang berdampak pada mutu hasil KP. Salah satu peran BPPMHKP Ambon dalam penerapan Sistema Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan disampaikan Kepala BPPMHKP Ambon dalam dialog dengan TVRI Maluku, yang dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7. Dialog peran BPPMHKP Ambon dalam peneraparan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan di Provinsi Maluku

Lokasi dari kegiatan Pengawasan ini dilakukan di Kab/Kota yang konsumsi ikannya tinggi dengan lokus adalah Pasar moderen, Pasar Tradisional, Supplier, TPI/PPI yang produk ikannya dikonsumsi oleh masyarakat lokal/domestic. Melalui pengawasan penilaian sarana prasarana dan pengujian sampel produk perikanan dengan parameter uji Organoleptik, mikrobiologi, kimia dan bahan berbahaya (formalin) dan parameter uji lain yang diperlukan dan Lokasi wilayah Perairan/Pelabuhan Perikanan di wilayah Republik Indonesia yang dilakukan monitoring terhadap ikan dan/atau hasil perikanan yang

menjadi sumber bahan baku Industri maupun konsumsi domestic yang bebas dari cemaran marine biotoxin dan cemaran kimia berbahaya. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan Balai KIPM Ambon adalah egiatan monitoring kesegaran ikan yang bertujuan untuk melihat ketersediaan stok ikan yang dikonsumsi masyarakat, melaksanakan pengawasan mutu produk perikanan di pasar untuk memastikan produk yang dikonsumsi masyarakat aman dan berkualitas serta mengecek harga komoditi perikanan pada saat Natal dan Tahun baru 2025, yang dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8. Monitoring Kesegaran ikan dalam rangka Natal dan Tahun Baru 2025 di Pasar Mardika Ambon

Adapun Target indikator kinerja IKU ini sebesar 70%, Hasil pengukuran indikator kinerja persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Ambon adalah target sebanyak 1 lokasi dan telah dilakukan pengawasan pada lokasi tersebut, sehingga realisasi sebesar 100%, persentase capaian terhadap target

sebesar 142,86%. dokumen pendukung capaian indikator berupa laporan pengawasan disajikan pada lampiran 4.

Capain indikator ini jika dibandingkan dengan target pada Rencana Strategis Balai KIPM Ambon tahun 2020-2024 sebesar 70% maka persetase capaian sebesar 142,86%. Hasil capaian indikator ini disajikan pada tabel 8 dan 9 sebagai berikut:

Tabel 8. Target dan capaian IKU 3 Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Capaian Tahun2024	% Thd Target
Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Ambon	70%	100%	142,86%

Tabel 9. Target dan Realisasi IKU 3 Tahun 2024

SP.1	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat								
IK.3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Ambon								
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target thn 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	% Realisasi terhadap target thn 2024	Target	% Capaian terhadap target Renstra
-	-	-	-	-	70,00	100,00	142,86	70,00	142,86

IKU 4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)

Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor merujuk pada perbandingan antara jumlah ikan dan hasil perikanan yang disertifikasi (jumlah HC yang terbit) dan

volume yang diekspor ke pasar internasional dan penolakan terhadap produk ikan dan hasil perikanan oleh negara tujuan ekspor (HC yang ditolak oleh negara tujuan ekspor).

Pengiriman ikan dan hasil perikanan yang diekspor telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan hasil perikanan serta tidak dilakukan penolakan oleh negara tujuan ekspor. Rasio ini penting untuk memahami bagaimana sektor perikanan memberikan kontribusi terhadap perekonomian khususnya perdagangan internasional.

Sertifikat Kesehatan (Health Certificate) adalah sertifikat yang menyatakan bahwa ikan dan hasil perikanan telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan untuk konsumsi manusia dan Bukti pengiriman hasil perikanan yang telah memenuhi persyaratan adalah diterimanya Sertifikat Mutu dan Kemanan Hasil Kelautan dan Perikanan. Penyerehan sertifikat HACCP dan sertifikat Traceability dapat dilihat pada Gambar 9, dan kegtan stufing ekspor dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 9. Penyerahan sertifikat HACCP dan Sertifikat Traceability

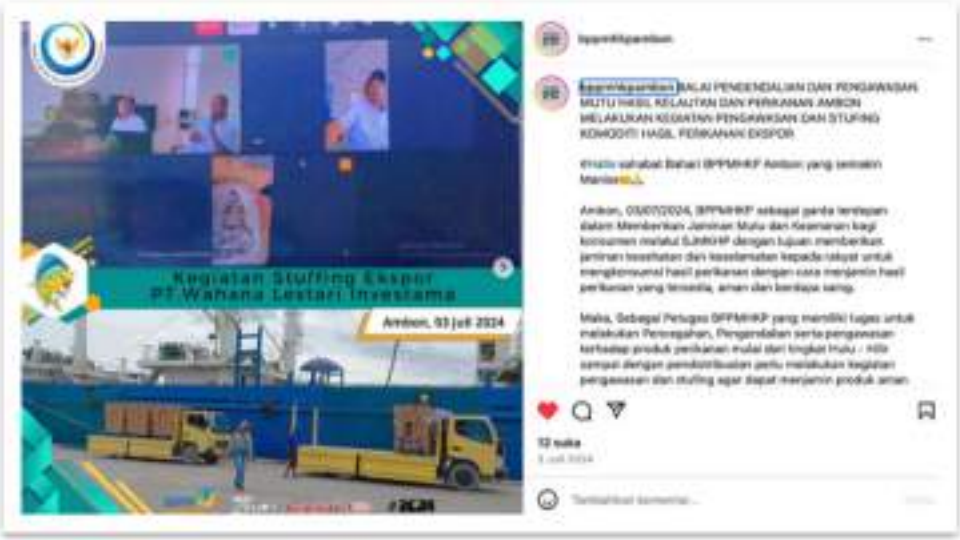

Gambar 10. Kegiatan stuffing ekspor yang dilaksanakan di PT. Wahana Lestari Investama

Pengukuran capaian untuk indikator kinerja ini dilakukan dengan dengan menghitung jumlah HC yang diterbitkan melalui hasil inspeksi pada tahun berjalan dan hasil pemeliharaan system yang diterbitkan tahun sebelumnya melalui monitoring dan evaluasi dikurangi dengan jumlah HC yang ditolak negara tujuan kemudian dibagi dengan jumlah HC yang diterbitkan.

Sesuai dengan data ekspor yang dikeluarkan oleh BPPMHKP Ambon sampai dengan triwulan IV tahun 2024, volume ekspor komoditi perikanan non hidup provinsi maluku 2.828.340 kg, jika dibandingkan dengan capaian pada triwulan IV tahun 2023 sebesai 1.865.125 kg maka terjadi kenaikan sebesar 52%. Untuk komoditi perikanan hidup sampai dengan triwulan IV tahun 2024 sebesar 21.734 ekor, jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar 118.410 ekor maka terjadi Penurunan sebesar 82 %. Nilai ekspor komoditi perikanan Provinsi Maluku sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 sebesar USD 15.052.513 jika dibandingkan dengan triwulan IV tahun 2023 sebesar USD 10.988.949, maka terjadi kenaikan nilai ekspor sebesar 37 %.

Komoditi perikanan maluku sampai dengan triwulan IV tahun 2024 diekspor ke 11 negara yaitu China, Japan, Vietnam, Singapore, United States, Malaysia, Thailand, Hong Kong, Saudi Arabia, Korea (South), dan Mexico. Ekspor komoditi perikanan Maluku periode Triwulan IV tahun 2024 didominasi oleh Udang Vaname, Tuna, Todak, Kerapu, dan Kepiting Bakau Hidup. Data ekspor komoditi perikanan Maluku disajikan pada Gambar 11 dibawah:

Gambar 11. Data Ekspor Tahun 2023 dan Tahun 2024

Indikator kinerja rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 99%, data ekspor tahun 2024 sebanyak 364 sertifikasi ekspor, dari penerbitan HC tersebut diterima oleh negara tujuan sebanyak 364 sertfikasi, sehingga capaian indikator ini pada tahun 2024 adalah 100% dengan persentase capaian 101,01%.

Realisasi indikator ini jika dibandingkan dengan realiasi tahun 2021 s.d 2023 yakni sebesar 100%, maka indikator memiliki realisasi yang sama pada tahun 2024. jika indikator ini dibandingkan dengan target pada Rencana Strategis tahun 2020-224 maka persentase capaian sebesar 101.01%

Target yang telah ditetapkan dapat tercapai karena sejak tahun 2021 BKIPM Ambon melakukan upaya peningkatan kualitas pelayanan dengan membuat beberapa terobosan seperti program jemput bola yang dalam implementasinya, BPPMHKP Ambon melakukan kunjungan langsung ke UPI untuk sosialisasi tentang pentingnya penerapan system jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta manfaat yang diperoleh dengan penerapan system jaminan tersebut. Selain program jemput bola, BPPMHKP Ambon juga rutin melaksanakan kegiatan temu mitra. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai media untuk melakukan diskusi, sharing informasi dan keluhan dari pelaku usaha terkait dengan layanan yang telah diberikan oleh BPPMHKP Ambon. Terkait dengan keluhan

ataupun permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha, sedapat mungkin langsung ditindaklanjuti pada pertemuan tersebut.

Hasil pengukuran indikator rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon disajikan pada tabel 10 dan 11.

Tabel 10. Capaian IKU 4 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2004	% Thd Target
Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon	99%	100%	101,01%

Tabel 11. Target dan Realisasi IKU 4 Tahun 2024

SP.1	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat								
IK.4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon								
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target Thn 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	% Realisasi terhadap target Tahun 2024	Target (%)	% Capaian terhadap Target Renstra
-	-	100,00	100,00	100,00	99,00	100,00	101,01	99,00	101,01

Sasaran Program : Terwujudnya Pengelolaan KP yang berdaulat, akuntabel dan berkelanjutan

Sasaran Kegiatan : Pengendalian Sistem Jamnn Mutu Keamana Hasil Kelautan dan Perikanan Yng Konsisten Sesuai Standar.

IKU 5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspkesi lingkup Balai Ambon (UPI)

Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi merupakan hasil penilaian

dari evaluasi terhadap laboratorium dalam mematuhi standar mutu yang berlaku yang mengacu pada ISO/IEC 17025 dan ISO/IEC 17020 dan dinyatakan dalam bentuk presentase berdasarkan Tingkat kesesuaian terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam standar tersebut. Skor tinggi menunjukkan bahwa laboratorium telah memenuhi atau mendekati pemenuhan terhadap standar sistem manajemen mutu, sedangkan skor rendah menunjukkan adanya kelemahan dalam penerapan sistem manajemen mutu yang perlu diperbaiki.

ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar pada laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang digunakan sebagai acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium penguji yang kompeten dan menjadi dasar saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian baik didalam maupun luar negeri

Tingkat pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji (ISO 17025) di laboratorium official control yang dinilai melingkupi:

1. Ruang Lingkup;
2. Acuan Normatif;
3. Persyaratan Umum;
4. Persyaratan Struktural;
5. Persyaratan Sumber Daya;
6. Persyaratan Proses;
7. Persyaratan Sistem Manajemen

ISO/IEC 17020 adalah standar yang mengatur persyaratan untuk Lembaga Inspeksi yang melakukan inspeksi teknis dan non teknis, standar ini bertujuan memastikan bahwa Lembaga inspeksi menjalankan proses inspeksi yang konsisten, objektif dan akurat sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Nilai kualitas penerapan ISO/IEC 17020 diperoleh dari nilai rata-rata penerapan sistem manajemen mutu Lembaga inspeksi (ISO 17020) yang dinilai melingkupi:

1. Persyaratan Umum
2. Persyaratan Struktural
3. Persyaratan Sumberdaya
4. Persyaratan Proses
5. Persyaratan Sistem Manajemen

Pengukuran untuk indikator kinerja nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspkesi lingkup Balai Ambon yaitu dengan menghitung persentase nilai penerapan ISO 17020 dan persentase penerapan ISO 17025. Gambar 12 menampilkan Pelaksanaan kegiatan Surveilan I SNI ISO/IEC 17020:2012 dan Surveilan II SNI ISO//IEC 17025:2017 yang dapat dilihat pada Gambar 13.

Gambar 12. Kegiatan survailan I SNI ISO/IEC 17020:2012 di BPPMHKP Ambon, pada tanggal 13 Agustus 2024

Gambar 13. Kegiatan survailan II SNI ISO/IEC 17025:2017 di BPPMHKP Ambon, pada tanggal 24 oktober 2024

Target Indikator Kinerja nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspkesi lingkup Balai KIPM Ambon pada tahun 2024 ditargetkan 70%, realisasi capaian Indikator ini telah memenuhi penerapan ISO 17020 dan ISO 17025, dengan demikian realisasi capaian indikator sebesar 100%, persentase capaian terhadap target sebesar 142,86%, data penerapan ISO 17020

dan ISO 17025 disajikan pada lampiran 6, Hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini disajikan pada tabel 12 dan 13 sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian IKU 5 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Thd Target
Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspkesi lingkup Balai Ambon	70%	100%	142,86%

Tabel 13. Target dan Realisasi IKU 5 Tahun 2024

SP.1	Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan Meningkat								
IK.5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspkesi lingkup Balai KIPM Ambon								
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target thn 2024 (%)	Realisasi Tahun 2024 (%)	% Realisasi terhadap target thn 2024	Target (%)	% Capaian terhadap target Renstra
-	-	-	-	-	70%	100%	142,86	70%	142,86

IKU 6 — Index kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Ambon (Index)

Indeks persepsi kualitas pelayanan lingkup BPPMHKP Ambon adalah suatu ukuran untuk mengetahui persepsi customer terkait dengan pelayanan yang diberikan oleh BPPMHKP Ambon kepada seluruh customer. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15 Tahun

2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BPPMHKP Ambon terus berkomitmen untuk memberikan kepuasan pelayanan terhadap pengguna layanan pada BPPMHKP Ambon dengan memberikanan pelayanan 24 jam sebagaimana Gambar 14.

Gambar 14. Pelayanan Sertifikasi Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada hari Libur Nasional 29 Januari 2025

Untuk mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan yang telah diberikan oleh BPPMHKP Ambon maka dilakukan survey setiap 3 (tiga) bulan sekali. Survey tersebut dilakukan secara online melalui link http://ok.bkipm.kkp.go.id/skm, link tersebut di berikan kepada pengguna jasa yang pernah di berikan layanan sertifkasi baik ekspor, impor maupun layanan sertifikasi domestik pada masa penilaian kepuasan pelanggan dan masing masing pengguna jasa mengisi survey. Survey yang dilakukan dengan memberikan kuesioner yang mana pada keusioner tersebut 9 (sembilan) unsur pelayanan, yaitu:

1. Persyaratan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/Tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksana
7. Perilaku Pelaksana
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
9. Sarana dan Prasarana

Hasil survey tersebut menjadi dasar BPPMHKP Ambon untuk melakukan perbaikan sistem layanan untuk semua produk layanan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Indikator kinerja Nilai survei kepuasan masyarakat layanan publik di UPT BPPMHKP Ambon (nilai) ditargetkan pada triwulan IV tahun 2024 dengan index 3,36, realisasi triwulan IV capaian indikator ini adalah sebesar index 4 dengan kategori sangat baik, dengan persentase capaian sebesar 119,05%. Jika capaian indikator ini dibandingkan dengan target pada Rencana Strategis tahun 2020-2024 maka persentase capaian sebesar 119,05%.

Jika capaia indikator ini dibandingkan dengan capaian TW-IV tahun 2022 dengnan indeks 3.69 (92,31) maka indikator ini naik 0,08%, jika dibandingkan dengan capaian TW-IV tahun 2023 dengan indeks 3,89 (97,29) maka capaian indikator ini naik 0,03%. Jika capaian indikator ini dibandingkan dengan target pada Rencana Strategis Balai KIPM Ambon tahun 2020-2024 maka persentase capaian sebesar 119,05%. Berikut Gambar 15 menampilkan realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Ambon (Index):

Gambar 15. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan TW-IV

Dengan hasil survey IKM ini menunjukkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan oleh BPPMHKP Ambon dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk layanan serta janji layanan BPPMHKP Ambon sudah berjalan dengan sangat baik.

Data dukung indikator ini berupa laporan IKM pada tahun 2024 disajikan pada lampiran 7 dan hasil capaian indikator kinerja secara rinci disajikan pada table 14 dan 15 sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian IKU 6 dan Target pada tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Thd Target
Index kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Ambon (Index)	3,36	4	119,05%

Tabel 15. Target dan Realisasi IKU 6 pada Tahun 2024

SP.2	Terwujudnya Pengelolaan KP yang Berdaulat, Akuntabel dan Berkelanjutan								
IK.6	Index kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Ambon (Index)								
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target thn 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi terhadap target 2024	Target	% Capaian terhadap target Renstra
-	-	-	-	-	3,36	4,00	119,05	3,36	119,05

IKU 7 — Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018). Dalam uapaya peningkatan Indeks profesionalisme ASN lingkup Balai KIPM Ambon, maka setiap senin dilaksanakan Apel Integritas, Breafing dan Doa Bersama (Gambar 16) yang bertujuan untuk mengingatkan pegawai agar selalu berintegritas tinggi dalam melayani Masyarakat.

Gambar 16. Pelaksanaan Kegiatan Apel Integritas, Breafing Pagi dan Doa Bersama di BPPMHKP Ambon

Adapun Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDM Aparatur, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Untuk menghitung indeks profesionalitas ASN ini digunakan rumus sebagai berikut: Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi: kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin

1. Kualifikasi diukur dari indikator riwayat Pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
   a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga)
   b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua)
   c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu)/ D-4 (Diploma-Empat)
   d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga)/ SM (Sarjana Muda)
   e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu)/D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat
   f. Pendidikan di bawah SLTA

   Dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kualifikasi*)	Nilai Kualifikasi
5	Pendidikan S-3 (strata-tiga)	25
4	Pendidikan S-2 (strata-dua)	20
3	Pendidikan S-1 (strata-satu)/D-IV (diploma-empat)	15
2	Pendidikan D-III (Diploma-tiga)/SM (sarjana muda)	10
1	Pendidikan D-I (Diploma-satu)/D-II (Diploma dua)/ SLTA Sederajat	5
0	Pendidikan dibawah SLTA	1

2. Kompetensi diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: DiklatKepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara terakhir dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Kompetensi **)	Nilai Kompetensi Sesuai Jabatan		
		Kompetensi Struktural	Kompetensi Jabfung	Kompetensi Staff
	Diklat Struktural	15	-	-
1	Pernah ikut Diklat PIM pada levelnya	15	-	-
0	0 Tidak pernah ikut Diklat PIM pada	0	-	-
	Diklat Fungsional	-	15	
1	Pernah ikut diklat fungsional	-	15	
0	Tidak pernah ikut diklat fungsional	-	0	
	Diklat 20 JP	15	15	22,5
1	Pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	15	15	22,5
0	Tidak Pernah ikut diklat 20 JP dalam tahun terakhir	0	0	0
	Seminar	10	10	17,5
1	Pernah ikut Seminar	10	10	17,5
0	Tidak Pernah ikut Seminar	0	0	0
	Total Mengikuti Kompetensi	40	40	40

3. Kinerja diukur dari indikator penilaian prestasi kienerja PNS, yang meliputi: a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP), dan b. Prilaku kerja, dengan formula sebagai berikut:

No	Keterangan Nilai SKP	Nilai SKP	Nilai Kinerja
1	Sangat Baik	91 – Ke Atas	30
2	Baik	76 s.d 90	25
3	Cukup	61 s.d 75	15
4	Kurang	51 s.d 60	5
5	Buruk	50 s.d ke Bawah	1

4. Disiplin diukur dari indikator Riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami meliputi: a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin, dan b. pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat) dengan formula sebagai berikut:

Nilai	Nama Hukuman Disiplin	Nilai Disiplin
O	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin	5
R	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Ringan	3
S	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Sedang	2
B	Pernah mendapatkan hukuman disiplin Berat	1

5. Sumber data pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dapat diperoleh dari beberapa sumber yang tervalidasi meliputi:
   a. Kualifikasi, dihitung dari kondisi tingkat Pendidikan pangkat terakhir dari pegawai dengan ketentuan sesuai SK Pencantuman gelsar yang sudah diupdate pada Aplikasi SIMPEG Online KKP.
   b. Kompetensi, diolah datanya dari aplikasi SIMPEG Online KKP dengan ketentuan sebagai berikut :
      - Perhitungan nilai DIKLAT PIM, Diklat Fungsional/Teknis, Diklat 20 JP dan Seminar diwajibkan sesuai tingkat jabatannya.
      - Pejabat struktural wajib sudah melaksanakan Diklat PIM sesuai dengan level terakhirnya, Diklat 20 JP dan seminar dalam satu tahun terakhir dengan total bobot yaitu 40.

Pencapaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks) pada tahun 2024 sebesar 89,3 jika dibandingkan dengan target pada tahun 2024 yakni 86, maka persentase capaian indikator ini sebesar 103,84%. Jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar 81,96 maka realisasi tahun 2024 meningkat sebesar 8,33%, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 sebesar 84,72 maka capaian indikator IP ASN 2024 meningkat 5,13%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 90,23 maka capaian indikator ini turun sebesar 8,92%, Jika capaian indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks) dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 103,84%.

Data dukung capaian indikator ini berupa tangkap layar hasil pengukuran IP ASN pada aplikasi IP ASN Biro Kepegawaian Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2024 disajikan pada lampiran 8. untuk hasil pengukuran capaian indikator ini disajikan pada tabel 16 dan 17 sebagai berikut:

Tabel 16. Capaian IKU 7 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Thd Target
Index profesionalitas ASN lingkup Balai KIPM Ambon (Index)	86	89,3	104,84%

Tabel 17. Target dan Realisasi IKU 7 Tahun 2024

SP.3	Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM								
IK.7	Indeks Profesionalitas ASN BKIPM Lingkup Balai KIPM Ambon (Indeks)								
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target thn 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi terhadap target thn 2024	Target	% Capaian terhadap target Renstra
-	-	81,86	84,72	90,23	86,00	89,30	103,84	86,00	103,84

IKU 8 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Lingkup Balai KIPM Ambon

Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Adapun kinerja adalah hasil dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dan pegawai selama triwulan tertentu. Penilaian dalam rekonsiliasi kinerja dilakukan pada 3 Aspek yakni: 1. Aspek Kepatuhan 2. Aspek Kesesuain 3. Aspek Ketercapaian.

Salah satu Rekomendasi Kemen PAN & RB dari hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 yakni “Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (feedback) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Target nilai Penilaian Mandiri SAKIP BPPMHKP Ambon pada tahun 2024 yaitu 82. Pengukuran indikator kinerja ini akan menyentuh beberapa aspek seperti: kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas pelaksanaan kegiatan dan

efisiensi pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja rekonsiliasi kinerja BPPMHKP Ambon akan diukur pada akhir tahun 2024.

Indikator kinerja nilai penilaian mandiri SAKIP lingkupBalai KIPM Ambon pada tahun 2024 hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan capaian nilai 83,75 dengan persentase 102,13%. capaian tesebut jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 dengan nilai 90,07, realisasi tahun 2024 menurun sebesar 7,02%, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2022 dengan nilai 96,7 maka capaian indikator ini menurun 13,39%, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2023 dengan nilai 88,55 maka capaian indikator ini menurun 0,05%, dan jika capaian indikator kinerja nilai rekonsiliasi kinerja dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 maka realisasi indikator ini mencapai 102,13%.

Data dukung capaian indikator ini berupa hasil penilaian mandiri SAKIP dari Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan dengan nomor:B.12/BPPMHKP.1/RC.610/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 disajikan pada lampiran 9. untuk hasil pengukuran kinerja ini disajikan pada tabel 18 dan 19 sebagai berikut:

Tabel 18. Capaian IKU 8 dan Target pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Thd Target
Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	82	83,75	102,13%

Tabel 19. Target dan Realisasi IKU 8 pada Tahun 2024

SP.3	Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM	
IK.8	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	
Realisasi Tahun 2019 - 2023	Tahun 2024	Renstra BKIPM Ambon 2020-2024

2019	2020	2021	2022	2023	Target thn 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi terhadap target thn 2024	Target	% Capaian terhadap target Renstra
-	-	90,07	96,70	88,55	82,00	83,75	102,13	82,00	102,13

IKU 9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Nilai Kinerja Anggaran adalah nilai yang dihasilkan atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas perencanaan anggaran melalui aplikasi MONEV Kemenkeu. Berdasarkan KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran Terhadap Perencanaan Anggaran. Nilai Kinerja Anggaran dinilai berdasarkan aspek Efektivitas dan Efisiensi yang dihitung dengan menjumlahkan hasil perkalian capaian setiap indikator dengan bobot pada masing-masing indikator.

Target Akhir Tahun Anggaran 2024 Level 0 (K/L) 82,00 Kategori Nilai Kinerja Anggaran dibagi menjadi 5 (lima), antara lain:

1. Sangat Baik, apabila NKA > 90;
2. Baik, apabila NKA >80 – 90;
3. Cukup, apabila NKA >60 – 80;
4. Kurang, apabila NKA >50 – 60;
5. Sangat Kurang, apabila NKA ≤ 50

Indikator kinerja nilai kinerja perencanaan anggaran lingkup Balai KIPM Ambon pada tahun 2024 ditargetkan dengan nilai 71 dan hasil pengukuran kinerja untuk indikator ini menunjukkan capaian

sebesar 85 dengan persentase 119,72%. Capaian indikator ini sesuai dengan nota dinas Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor:182/SJ.2/TU.210/I/225 tanggal 15 Janari 2025 disajikan pada lampiran 10. untuk hasil pengukuran indiktor kinerja ini disajikan pad tabe 20 dan 21 sebagai berikut:

Tabel 20. Capaian IKU 9 dan Target pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Thd Target
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	71	85	119,72%

Tabel 21. Target dan Realisasi IKU 9 pada Tahun 2024

SP.3	Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM								
IK.9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)								
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target thn 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi terhadap target thn 2024	Target	% Capaian terhadap target Renstra
-	-	-	-	-	71,00	85,00	119,72	71,00	119,72

IKU 10	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)

Pelaksanaan APBN pada Kementerian Negara/Lembaga harus dilaksanakan secara berkualitas serta memenuhi indikator kinerja yang telah ditargetkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga. Dalam mengukur kualitas pelaksanaan anggaran maka Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menetapkan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran atau dikenal dengan IKPA. Singkatnya IKPA

merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga. IKPA digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) yang terintegrasi pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN) yang dijadikan ukuran dan mencerminkan kinerja satuan kerja atas kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, serta kualitas hasil pelaksanaan anggaran.

Penilaian kinerja anggaran Kementerian Negara/Lembaga ini penting, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja birokrasi dalam pelaksanaan anggaran yang telah direncanakannya. Hal ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, dimana ada tiga aspek pengukuran dan indikator kinerja. Penilaian pertama adalah kualitas perencanaan anggaran yakni kesesuaian dengan perencanaan yang telah ditetapkan, seperti kesesuaian antara anggaran yang direncanakan dengan yang direalisasikan sehingga menghasilkan keluaran (output) dan dampak (outcome) sesuai perencanaan. Bentuk konkritnya adalah menggambarkan kinerja apakah sesuai dengan perencanaan sesuai dengan yang telah ditetapkan atau terdapat deviasi. Kemudian yang kedua adalah kualitas pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja dalam melaksanakan operasionalisasinya sehari-hari. Pengukuran aspek kualitas pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kemampuan Satker dalam merealisasikan anggaran yang telah

ditetapkan pada DIPA. Ketiga yaitu Hasil Pelaksanaan Anggaran yang berhubungan dengan program-program yang telah direncanakan tercapai sesuai dengan target-target yang telah ditetapkan dan tepat sasaran. Pelaksanaan anggaran akan lebih ekonomis, efektif dan efisien jika mematuhi regulasi yang ada, sehingga keluaran dan dampak yang dihasilkan dapat terlihat nyata dan bermanfaat bagi masyarakat.

Berdasarkan Nota Dinas Biro Keuangan 49/SJ.2/RC.610/I/2022 tanggal 11 Januari 2022, bahwa dengan adanya kebijakan Redesain Sitem Penganggaran (RSPP) yang bertujuan memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran, dimana kebijakan tersebut berpengaruh terhadap penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). sehingga terjadi perubahan periode pengukuran menjadi smeesteran. Realisasi indikator ini pada Tahun 2023 diukur setiap semester dengan menghitung konversi bobot berdasarkan evaluasi terhadap aspek kesesuaian antara perencanaan dan pelaksaan anggaran, askpek kepatuhan terhadap regulasi, aspek efektivitas terhadap terhadap kegiatan dan efesiensi pelaksanaan yang dilakukan oleh Biro Keuangan-KKP.

1. Revisi DIPA
   a) Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap (tidak masuk adalah revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif).
   b) Frekuensi revisi hanya diperkenankan 1x dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada 2x revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya. Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar sangat selektif dalam melakukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap).
- Satker agar dapat mengelola dan menghimpun kebutuhan revisi anggaran untuk kemudian dapat dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan baik kepada DJA maupun Kanwil DJPb sebanyak 1 kali dalam 1 triwulan.

2. Deviasi Halaman III DIPA
   a) Halaman III DIPA memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalan atas pelaksanaan anggaran yang dilakukan pada suatu satker.
   b) Validitas dan keakuratan RPD pada Halaman III DIPA sangat penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara guna memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran atas suatu DIPA.
   c) Keakuratan Deviasi Halaman III pada IKPA dihitung untuk rencana yang dieksekusi sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan Rencana aksi yang dilakukan antara lain:
      - Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, seluruh satker yang memiliki deviasi tinggi, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian Halaman III DIPA ke Kanwil DJPb pada triwulan berjalan.
      - Satker agar lebih disiplin dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya, dan menjadikan RPD pada Halaman III DIPA sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal pada Satker.

3. Pengelolaan UP
   a) SPM GUP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada Bendahara Pengeluaran.
   b) Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP Tunai (tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah).
   c) Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada DIPA satker masing-masing sebagai realisasi anggaran.

      Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

   - Seluruh satker agar memperhatikan triwulan pengajuan SPM GUP dariSP2D UP/GUP terakhir paling lambat dalam rentang 30 hari kalender (pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan keKPPN) dan tidak menambah frekuensi SPM GUP yang terlambat.

4. LPJ Bendahara
   a) LPJ Bendahara Pengeluaran merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya.
   b) LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya jika tanggal 10 adalah hari libur kepada KPPN.
   c) Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak Satker pertama kali melalukan upload tersebut.

      Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

   - Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal

10 bulan berikutnya, dan memastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT

5. Penyampaian Data Kontrak
   a) Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas Rp 200 Juta (bukan hasil pengadaan langsung menurut batasan Perpres No. 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).
   b) ADK kontrak maksimal disampaikan ke KPPN 5 hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian/konversi di KPPN.

   Rencana aksi yang dilakukan antara lain: Penyelesaian Tagihan:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian data kontrak sebelum 5 hari kerja setelah ditanda tangani dan dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya (approval) oleh KPPN.

6. Penyelesaian Tagihan
   a) Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual (SPM LS Kontraktual Non-Belanja Pegawai) yang ADK nya telah disampaikan ke KPPN (dengan nilai kontrak diatas Rp 200 Juta).
   b) Penyelesaian tagihan dihitung dengan ketentuan selambat-lambatnya selama 17 hari kerja setelah BAST/BAPP, satker telah diterbitkan SPM tagihan dimaksud ke KPPN.

   Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda-tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP

7. Penyerapan Anggaran
   a) Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan: (15%), (40%), I (60%), dan V (90%).
   b) Pagu anggaran pembagi diperhitungkan sebagai pagu efektif, dimana pagu anggaran DIPA dikurangi dengan pagu yang masih diblokir.

   Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

   - Untuk mempertahankan capaian ini, maka Satker agar senantiasa memperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu DIPA efektif.
   - Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

8. Retur SP2D
   a) Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit.
   b) Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, satker agar senantiasa meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank Pihak Ketiga/ penerima pembayaran.
- Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, satker agar berkoordinasi dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari 7 hari kerja.

9. Perencanaan KAS

a) Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas/RPD Harian yang disampaikan ke KPPN untuk jenis transaksi besar (Diatas Rp 1 Miliar).

b) Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas Kas Negara yang terencana dan terkendali.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian Renkas (RPD Harian) untuk transaksi pencairan dana dalam kategori besar (> Rp 1 Miliar) yang memerlukan penyampaian renkas dengan tidak lebih dari 5 hari kerja sejak tanggal APS pada Aplikasi SAS sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

10. Pengembalian/kesalahan SPM

a) Indikator ini dihitung dari besaran/jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN.
b) tagihan dimaksud ke KPPN.

Rencana aksi yang dilakukan antara lain:

- Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, Satker agar senantiasa meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual (LS Non-Belanja Pegawai) paling lambat dalam 17 hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar teliti, lengkap, dan akurat dalam pengisian uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST/BAPP.

Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai) pada tahun 2024 ditargetkan sebesar 93,76 sesuai dengan Renstra BKIPM Ambon, hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Balai KIPM Ambon pada tahun 2024 yaitu 96.53 dari target 93,63 dengan persentase capaian sebesar 102,95%, dimana capaian ini dipengaruhi oleh Nilai IKPA pada point Deviasi Halaman III DIPA yang memuat Rencana Penarikan Dana (RPD) dalam pelaksanaan realisasi anggaran terdapat deviasi yang mengakibatkan nilai tidak tercapai maksimal yang seharusnya mendapat nilai 15 point, namun hanya mendapat nilai 12,38, hal ini disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara sub bagian dalam merencanakan kegiatan dan realisasi anggaran. Realisasi Nilai IKPA tahun 2024 jika dibandingkann dengan realisasi pada tahun 2020 sebesar 97,23% maka realisasi tahun 2024 menurun 0,72%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 senilai 94,53 maka capaian indikator ini naik 2,12%, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022

senilai 97,57 maka realisasi tahun 2024 turun sebesar 1,07%, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023 senilai 93,63 maka capaian indikator ini naik 3,10% dan jika capaian nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan target pada rencana strategis Balai KIPM Ambon 2020-2024 sebesar 93,76 maka realisasi indikator ini mencapai 102.95%.

Capaian indikator kinerja ini sesuai dengan nilai yag diperoleh atas penilaian Kementerian Keuangan melalui Kantor Perbendaharaan Negara yang tercantum dalam aplikasi OM SPAN yakni sebagaimana ditampilkanpada gambar 17 berikut ini :

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

STASIUN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN KELAS I AMBON

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Komponen Bobot	Dispensasi SPM (Pengurang)	Nilai Akhir (Nilai Total/Komponen Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Rencana RKAKL/DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengaktifan UP dan TUP	Capaian Output				
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON	Nilai	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					Bobot	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
					Nilai Akhir	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				
					Nilai Akhir	[illegible]		[illegible]				[illegible]				

Gambar 17. Hasil Capaian IKPA sesuai Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan

Data dukung capaian indikator Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran berupa tangkap layar hasil penilaian IKPA pada aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan disajikan pada lampiran 11, untuk target dan pengukuran capaian indikator ini disajikan pada tabel 22 dan 23 sebagai berikut:

Tabel 22. Capaian IKU 10 dan Target pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Thd Target
Nilai indikator pelaksanaan anggaran lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)	93,76	96,53	102,95%

Tabel 23. Target dan Realisasi IKU 10 pada Tahun 2024

SP.3	Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM								
IK.10	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Balai KIPM Ambon (Nilai)								
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target thn 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi terhadap target thn 2024	Target	% Capaian terhadap target Renstra
-	97,23	94,53	97,57	93,63	93,76	96,53	102,95	93,76	102,95

IKU 11 Penyelesasian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Nilai temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK BPPMHKP merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Formula perhitungan Indikator Penyelesasian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Ambon (%) sebagai berikut:

$$= \frac{Jumlah\ Rekomendasi\ BPK\ lingkup\ UPT\ yang\ ditindaklanjuti}{Jumlah\ Total\ Rekomendasi\ BPK\ lingkup\ UPT} X\ 100\%$$

Pada tahun 2024 BKP RI telah melaksanakan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kemengterian Kelautan dan Perikanan secara umum dan BPPMHKP secara khusus beserta Unit Pelaksana Teknis lingkup BPPMHKP, berdasarkan hasil pemeriksaan sesuai Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP nomor: 1628/ITJ.0/TU.210/IX/2024 tanggal 30 September 2024 menunjukan batas toleransi materialitas temuan pengawasa eksternal (BPK RI) untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar 0,0939% dan untuk BPPMHKP sebesar 0,0023%, dimana dari hasil pemeriksaan Balai KIPM Ambon tidak terdapat temuan, dengan demikian untuk capaian indikator penyelesaian temuan BPK terealisasi 100%.

Data dukung capaian indikator kinerja penyelesaian temuan BPK berupa Nota Dinas Inspektorat Jenderal KKP disajikan pada lampiran 12, untuk target dan pengukuran capaian indikator ini disajikan pada tabel 24 dan 25 sebagai berikut:

Tabel 24. Capaian IKU 11 dan Target pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	% Thd Target
Penyelesaian temuan BPK lingkup Balai KIPM Ambon (%)	93,76	96,53	102,95%

Tabel 25. Target dan Realisasi IKU 11 pada Tahun 2024

SP.3	Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM								
IK.11	Penyelesaian temuan BPK Lingkup Balai KIPM Ambon (%)								
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target thn 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi terhadap target thn 2024	Target	% Capaian terhadap target Renstra
-	-	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%

IKU 12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BKIPM lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Ambon adalah jumlah rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat Jenderal Kepada BPPMHKP Ambon berdasarkan LHP (terbatas pada LHP Audit, Reviu dan Evaluasi baik bentuk surat maupun BAP) tahun 2024 yang telah ditindaklanjuti (berstatus tuntas) oleh BPPMHKP Ambon yang menjadi objek pengawasan.

Data temuan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal KKP yang digunakan untuk pengukuran capaian IKU sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja dengan cakupan hanya pada LHP yang diterbitkan pada periode sesuai dengan pedoman pengukuran kinerja yaitu triwulan LHP terbatas pada laporan hasil audit, evaluasi dan reviu yang diterbitkan sampai dengan bulan Desember 2023, temuan yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran. LHP pengawasan Itjen KKP yang masih belum tuntas ditindaklanjuti diluar LHP yang digunakan dalam pengukuran IKU dan tetap wajib ditindaklanjuti dan dituntaskan penyelesaiannya serta disampaikan bukti tindaklanjut kepada Inspektorat Jenderal KKP. Pengukuran IKU Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM dilakukan secara triwulanan dengan target kumulatif tahunan sebesar 80%. Pengukuran dengan menggunakan rumus:

$$\frac{\sum Nt}{\sum N} X100\%$$

$\sum Nt$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang telah ditindaklanjuti oleh BKIPM Ambon

$\sum N$: Jumlah rekomendasi dari LHP Inspektorat Jenderal KKP yang diberikan kepada BKIPM Ambon

Audit kinerja dilaksanakan pada Bulan Juli tahun 2023. Adapun beberapa temuan dan rekomendasi yaitu :

A. Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon Tahun 2023

Terdapat 4 (Empat) temuan dan 6 (Enam) rekomendasi dari Evaluasi Pelayanan Publik pada Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pada Aplikasi Sidak nomor: R.129/ITJ.4/HP.430/VI/2023 tanggal 09 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Temuan terkait Kebijakan Pelayanan

   Dengan rekomendasi yaitu Kepala BPPMHKP Ambon agar :

   a. Melakukan reviu Standar Pelayanan secara berkala (tahunan) dengan memasukan hasil SKM dan pengaduan atau saran dari Masyarakat

   b. Menambah fitur/informasi hasil SKM di Aplikasi BKIPM Mobile.

2. Temuan terkait Saran dan Prasana

   - BPPMHKP Ambon agar memperbaiki ruang laktasi/ruang bermain anak untuk menjaga keamanan dan kenyamanan.

3. Temuan terkait Sistem Informasi Pelayanan Publik

   a. Menambah informasi kontak konsultasi dan pengaduan pada website BPPMHKP Ambon

b. Membuat rencana kerja pengelola informasi dan dokumentasi secara harian beserta data dukung

4. Temuan terkait Inovasi

- BPPMHKP Ambon agar berkoordinasi secara tertulis kepada Sekretariat Badan KIPM terkait dengan pengusulan keikutsertaan Aplikasi SILAPA TUA dalam lomba inovasi

2. Hasil Evaluasi PNBP Tahun 2022-2023 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Balai KIPM) Ambon.

Terdapat 2 (Dua) temuan dengan 11 (Sebelas) rekomendasi dari Evaluasi PNBP Tahun 2022-2023 pada Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan BPPMHKP Ambon Pada Aplikasi Sidak nomor: R.147/ITJ.4/HP.470/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 sebagai berikut:

1. Temuan Terdapat Pengambilan jumlah Sampel Pengujian Organoleptik Tidak Sesuai Ketentuan, dengan rekomendasi yaitu :
   a. BPPMHKP Ambon agar memerintahkan secara tertulis kepada seluruh Petugas Pengambil Contoh Uji untuk lebih cermat dalam menentukan jumlah sampel uji organoleptik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Temuan terkait kegiatan Surveilans Monitoring Penerapan CKIB belum sesuai ketentuan, dengan rekomendasi sebagai berikut :
   a. Berkoordinasi secara tertulis dengan Kepala Pusat karantina Ikan, terkait dengan kejelasan pungutan PNBP uji laboratorium sampel pada kegiatan Monitoring dan Surveilans CKIB
   b. Melakukan telaah dan/atau kajian terkait pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Surveilans CKIB di BPPMHKP

Ambon terkait dengan keterbatasan sumber daya dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala Badan KIPM

c. Menyusun Mekanisme/SOP kegiatan monitoring dan surveilans dengan memanfaatkan aplikasi SILAPA TUA
d. Menegur secara tertulis kepada Sub Kordinator Tata Pelayanan selaku penanggungjawab Sertifikasi Kesehatan Ikan atas: a) Kelalaiannya tidak melakukan monitoring dan surveilans sesuai dengan ketentuan; b) Ketidakcermatan dalam penyusunan perencanaan monitoring dan surveilans serta menyampaikan jadwal kegiatan bulanan Surveilans HPIK/HPI Tertentu dan Monitoring Penerapan kepada IKI.
e. Memerintahkan kepada Sub Kordinator Tata Pelayanan selaku penanggungjawab Sertifikasi Kesehatan Ikan agar menyusun ulang jadwal rencana monitoring dan surveilans dengan mempertimbangkan penggunaan aplikasi SILAPA TUA dan menyampaikan kepada seluruh Inspektur Karantina.
f. Melakukan sosialisasi CKIB kepada 4 (empat) IKI yang telah tersertifikasi CKIB.
g. Menegur secara tertulis kepada Petugas karantina/mutu karena lalai dalam penerbitan sertifikat kesehatan ikan produk perikanan ekspor.
h. Melakukan pengendalian penerbitan sertifikat kesehatan ikan produk perikanan ekspor diseluruh wilayah kerja lingkup Balai Karantina Ambon antara lain dengan: a) Melakukan monitoring secara berkala (bulanan): b) Membuat mekanisme monitoring dan survailan pada IKI yang berlokasi diluar pulau Ambon

i. Memerintahkan secara tertulis kepada Verifikator/Inspektur Mutu/ Petugas Karantina agar lebih cermat dalam menentukan jumlah sampel
j. Kepada Kepala Badan KIPM agar memerintahkan secara tertulis kepada Kepala BPPMHKP Ambon agar lebih cermat dalam melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen persyaratan Laporan Hasil Pengujian dan melakukan pengendalian penerbitan sertifikat kesehatan ikan produk perikanan ekspor.

Terhadap rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dan telah dinyatakan tuntas sesuai dengan Berita Acara Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal nomor: 2551.05.10/ITJ/PL.420/X/2023.

Target Pencapaian indikator kinerja Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada tahun 2024 sebesar 80%. Pada tahun 2024 tidak terdapat rekomendasi hasil pengawasan APIP Internal KKP. Akan tetapi pada tahun sebelumnya terdapat rekomendasi APIP KKP sebanyak 79 rekomendasi namun rekomendasi tersebut telah ditindaklanjut 100%, sehingga capaian indikator ini pada tahun 2024 sebesar 100% degan persentase capaian sebesar 125%. jika capaian indikator ini dibandingkan dengan capaian tahun 2019 s.d 2024 senilai 100% maka indikator ini mempunyai capaian yang sama pada tahun 2024, dan Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 80% maka persentase capaian indikator ini sebesar 125%.

Data dukung capaian indikator kinerja Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Baai KIPM Ambon (%) berupa tangkap layar hasil tindak lanjut rekomendasi pada aplikasi SIDAK disajikan pada lampiran 13, untuk target dan hasil pengukuran secara rinci disajikan pada table 26 dan 27 sebagai berikut:

Tabel 26. Capaian IKU 12 dan Target pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	% Thd Target
Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%)	80%	100%	125%

Tabel 27. Target dan Realisasi IKU 12 pada Tahun 2024

SP.3	Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM									
IK.12	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BPPMHKP Ambon (%)									
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM Ambon 2020-2024		
2019	2020	2021	2022	2023	Target thn 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi terhadap target thn 2024	Target	% Capaian terhadap target Renstra	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	

IKU 13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup BPPMHKP Ambon (%)

Indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup BPPMHKP Ambon (%) dideskripsikan sebagai suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam Pengadaan Barang/Jasa lingkup Unit Eselon I telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengadaan barang/jasa (PBJ) merupakan

bagian dari aktivitas pembangunan yang rutin dilaksanakan oleh instansi pemerintah setiap tahunnya. Kegiatan ini menjadi sangat strategis dan penting untuk dilakukan pengawasan karena seingkali bernilai besar, mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi, dapat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi, mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, dan menentukan kualitas Laporan Keuangan. Karenanya, pengawasan yang efektif diperlukan untuk memastikan kesesuaian hasil pelaksanaan terhadap perencanaan, prosedur dan aturan yang berlaku.

Pada Tahun 2023 indikator Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa, BPPMHKP Ambon memiliki target 80% sebagai suatu ukuran untuk menggambarkan kualitas kinerja pengawasan Itjen dalam mengawal dan memastikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.

Pengukuran dilaksanakan secara tahunan pada V yang diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

b. Rencana umum pengadaan telah diupload ke dalam aplikasi SIRUP (20%)
c. Persentase jumlah pengadaan belanja modal yang dilaksanakan melalui SPSE (30%)
d. Laporan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa (20%).
e. Kesesuaian tahap pelaksanaan (30%)

Target indikator kinerja Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai KIPM Ambon (%) pada Tahun 2024 sebesar 80%, capaian indikator ini sebesar 84,34 dengan persentase capaian sebesar 105,43%, jika capaian ini dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 79,56% maka capaian tahun 2024 naik 6,01%, jika

dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 78,26% maka capaian tahun 2024 naik 7,77%, dan Jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 sebesar 80% maka persentase capaian indikator ini sebesar 105,43%.

Data dukung capaian indikator ini berupa hasil penilaian dari Inspektorat Jenderal KKP dengan nomor B.519/ITJ.4/HP.660/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024 disajikan ada lampiran 14, untuk target dan hasil pengkuran indikator kinerja ini disajikan pada tabel 28 dan 29 sebagai berikut:

Tabel 28. Capaian IKU 13 dan Target pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	% Thd Target
Tingkat keaptuhan pengadaan barang/jasa lingkup Balai KIPM Ambon (%)	80%	84,34%	105,43%

Tabel 29. Target dan Realisasi IKU 13 pada Tahun 2024

SP.3	Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM								
IK.13	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Balai KIPM Ambon (%)								
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target thn 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi terhadap target thn 2024	Target	% Capaian terhadap target Renstra
-	-	-	79,56%	78,26%	80%	84,34%	105,43	80%	105,43

IKU 14 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup Balai KIPM Ambon (%)

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merupakan salah satu

kegiatan strategis yang mendukung dan menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan BMN mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas laporan keuangan. Keterlibatan sumber daya yang besar dalam pengelolaan BMN seringkali diikuti dengan berbagai hambatan/permasalahan, dan bahkan menjadi temuan berulang aparat pengawasan internal maupun eksternal.

Pengawasan terhadap pengelolaan BMN diperlukan untuk memastikan kegiatan telah dilaksanakan sesuai ketentuan dan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Kementerian melalui kegiatan pengelolaan BMN, Inspektorat Jenderal (Itjen) KKP telah menetapkan Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP sebadai salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2021. Hal ini ditujukan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan Itjen KKP dalam mengawasi pengelolaan BMN di Lingkungan KKP. IKU tersebut merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern KKP dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup KKP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN diukur berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Tingkat pemanfaatan Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2023 (bobot 10%);
2. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal hingga tahun 2024 baik ke pengguna barang dan pengelola barang (bobot 25%);
3. Tingkat penyelesaian inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi aset) Tahun 2022-2024 yang diselesaikan di Tahun 2024 (25%).

4. Pemanfaatan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2024 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian (bobot 25%);
5. Penyusunan Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu (bobot 20%).

Indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan Lingkup Balai KIPM Ambon (%) dideskripsikan sebagai suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan lingkup BPPMHKP Ambon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Capaian indikator kinerja tingkat kepatuhan pengelolaan Lingkup Balai KIPM Ambon pada Tahun 2024 ditargetkan dengan nilai 80%, hasil pengukuran kinerja yang dilakukan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan menunjukkan bahwa Balai KIPM Ambon memperoleh nilai 97,50% dengan persentase capaian sebesar 121,88%, jika capaian ini dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 97,50% berarti tahun 2024 mempunyai capaian yang sama, jika dibandingkan dengan capai tahun 2023 sebesar 96,11% maka capaian tahun 2024 naik sebesar 1,45%, dan jika dibandingkan dengan target pada rencana strategis 2020-2024 maka persentase capaian sebesar 121,88%.

Data dukung capaian kinerja ini berupa hasil penilaian dari BPPMHKP disajikan pada lampiran 15. untuk target dan pengukuran secara rinci disajikan pada tabel 30 dan 31 sebagai berikut:

Tabel 30. Capaian IKU 14 dan Target pada Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama	Target Tahun 2024	Capaian Tahun 2024	% Thd Target

Tingkat keaptuhan BMN lingkup Balai KIPM Ambon (%)	80%	97,50%	121,88%

Tabel 31. Target dan Realisasi IKU 14 pada Tahun 2024

SP.3	Tata Kelola Pemerintahan Lingkup BKIPM								
IK.14	Tingkat Kepatuhan BMN Lingkup Balai KIPM Ambon (%)								
Realisasi Tahun 2019 - 2023					Tahun 2024			Renstra BKIPM Ambon 2020-2024	
2019	2020	2021	2022	2023	Target thn 2024	Realisasi Tahun 2024	% Realisasi terhadap target thn 2024	Target	% Capaian terhadap target Renstra
-	-	-	97,50%	96,11%	80%	97,50%	121,88	80%	121,88

2.1 Realisasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2024, Balai KIPM Ambon mendapat anggaran yang bersumber dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) dalam Program Pengembangan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dengan jumlah anggaran (DIPA Awal) sebesar Rp.8.515.535.000,- *(delapan miliar lima ratus lima belas juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)* dengan Revisi DIPA terakhir sebesar Rp. 5.396.566.000 *(lima miliar tiga ratus Sembilan puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)*. Anggaran tersebut sudah termasuk untuk penyelengaraan kegiatan yang dibiayai oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.34.510.000,- (*tiga puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupiah*). Revisi anggaran ini disebabkan oleh terbitnya Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dimana dengan terbitnya peraturan tersebut Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), telah bertransformasi menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP)

sehingga tugas perkarantinaan ikan yang dulunya dikerjakan oleh BKIPM Sekarang telah beralih fungsi ke Badan Karantina Indonesia (BKI), maka secara otomatis anggaran perkarantinaan ikan dialihkan ke BKI.

Pencapaian realisasi anggaran tahun 2024 tersebut terdiri atas realisasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp.2.543.454.38,- atau 99.58%, realisasi anggaran belanja barang sebesar Rp.2.803.653.762,- atau 98,64% dan di tahun 2024 ini Balai KIPM Ambon tidak tersedia anggaran untuk belanja modal. Pagu dan realisasi anggaran sesuai jenis belanja dapat dilihat pada tabel 32 sebagai berikut.

Tabel 32. Pagu dan Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

Uraian	Pagu	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
Belanja Pegawai	2.554.278.000	2.543.454.381	99,58%
Belanja Barang	2.842.288.000	2.803.653.762	98,64%
Belanja Modal	0	0	0
Jumlah	**5.396.566.000**	**5.347.108.143**	**99.58%**

Realisasi penyerapan anggaran Balai KIPM Ambon tahun 2024 untuk setiap kegiatan disajikan pada tabel 33.

Tabel 33. Penyerapan Anggaran per Kegiatan Tahun 2024

Program/ Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program			
Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	5,335,176,000	5,319,385,326	99,70
Kegiatan			
Pengendalian Mutu	295,828,000	295,673,028	99,95

Manajemen Mutu	132,525,000	132,043,800	99,64
Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan	4,906,823,000	4,891,668,498	99,69

BAB III
PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Sesuai hasil evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja pada tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa secara umum seluruh kegiatan yang dijadwalkan telah dilaksanakan Balai KIPM Ambon dan berhasil mencapai target sesuai target yang telah ditetapkan.

Nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon pada Tahun 2024 adalah sebesar 111,49. Nilai ini diperoleh dari pencapaian Sasaran Strategis (SS) dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai KIPM Ambon.

Sasaran dan indikator kinerja tahun 2024, dibagi menjadi 4 Triwulan, dengan sasaran kegiatan sebanyak 4 sasaran strategis, pada triwulan I Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon bertanggungjawab mewujudkan 7 (tujuh) indikator kinerja kegiatan, pada triwulan II sebanyak 10 (sepuluh) indikator kinerja kegiatan, pada triwulan III sebanyak 7 (tujuh) indikator kinerja utama, dan pada triwulan IV sebanyak 14 (empat belas) indikator kinerja kegiatan. Hasil pengukuran kinerja pada tahun 2024 menunjukkan ada 13 (tiga belas) indikator kinerja yang realisasi pencapaiannya melebihi target yang telah ditetapkan dan terdapat 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yang sesuai target, yaitu Penyelesaia temua BPK Lingkup Balai KIPM Ambon.

Alokasi anggaran Balai KIPM Ambon pada tahun anggaran 2024 sesuai dengan surat pengesahan DIPA Nomor: DIPA-032.13.2.649750/2024 Tanggal 30 November 2024 setelah direvisi

sebesar Rp.5.396.566.000,- (*lima milyar tiga ratus sembilam puluh enam juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah*). Anggaran tersebut sudah termasuk untuk penyelengaraan kegiatan yang dibiayai oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp.34.510.000,- *(tiga puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu rupah)*. Pencapaian realisasi anggaran tahun 2024 tersebut terdiri atas realisasi anggaran belanja pegawai sebesar Rp.2.543.454.38,- atau 99.58%, realisasi anggaran belanja barang sebesar Rp.2.803.653.762,- atau 98,64% dan di tahun 2024 ini Balai KIPM Ambon tidak tersedia anggaran untuk belanja modal.

3.2 Rekomendasi

Dalam rangka peningkatan kinerja dan perbaikan kualitas pelaporan hasil capaian kinerja pada BPPMHKP Ambon maka direkomendasikan beberapa poin, diantaranya:

1. Dalam pelaksanaan sertifikasi CPIB Kapal tahun 2024 beru tersertifikasi sebanyak 5 kapal, mengingat jumlah kapal di Provinsi Maluku cukup banyak diharapkan agar BPPMHKP Ambon dapat meningkatkan jumlah sertifikasi CPIB kapal, sehingga jaminan mutu produk perikanan di atas kapal tercapai.
2. Mengingat dengan adanya penghematan anggaran di tahun 2024, diharapkan agar Inspektur Mutu BPPMHKP Ambon dalam melaksanakan kegiatan Inspeksi dan Surveilan ke UPI dapat memaksilkan penggunaan Aplikasi SILAPATUA, sehingga efisiensi anggaran dapat maksimal.
3. Untuk lebih meningkatkan nilai survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di BPPMHKP Ambon, diharapkan agar petugas pelayanan memberikan informasi kepada pengguna jasa baik secara langsung

maupun melalui media elektornik agar memberikan penilaian atas pelayanan yang didapat dari BPPMHKP Ambon.

Pada Laporan Kinerja triwulan III tahun 2024, ada 3 (tiga) rekomendasi yang dihasilkan yaitu:

1. Dalam pelaksanaan surveilance sistem traceability menambahkan rekomendasi, tindak lanjut, dan batas tindak lanjut pada Laporan Singkat Hasil Verifikasi Traceability sesuai hasil verifikasi surveilance sistem traceability.
2. Realisasi anggaran untuk kegiatan standarisasi sistem dan kepatuhan masih sangat rendah yaitu baru terealisasi 11,59%, oleh karena itu direkomendasikan kepada Kepala Suba Bagian Umum BPPMHKP Ambon untuk melakukan akselerasi pelaksanaan kegiatan di bidang standarisasi sistem dan kepatuhan.
3. Untuk lebih meningkatkan nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA), diharapkan agar pelaksanaan realisasi anggaran dilaksanakan sesuai dengan rencana penarikan dana pada halaman III DIPA karena tingkat deviasi antara realisasi anggaran dan rencana penarikan dana dapat mempengaruhi nilai IKPA.

Rekomendasi pada laporan kinerja tahun 2024 seluruhnya telah ditindaklanjuti dengan melakukan beberapa tindakan perbaikan, diantaranya:

1. Dalam pelaksanaan surveilan sistem traceability Inspektur Mutu dalam melaksanakan tugas telah menambahkan rekomendasi, tindak lanjut, dan batas tindak lanjut pada Laporan Singkat Hasil Verifikasi Traceability sesuai hasil verifikasi surveilance sistem traceability.
2. Realisasi anggaran untuk kegiatan standarisasi sistem dan kepatuhan yang telah direvisi menjadi kegiatan Manajemen Mutu telah terealisasi anggaran sebesar 92,02% atau sebesar

Rp.132.043.800, hal dapat dilihat pada realisasi anggaran pada Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan sebagaimana gambar 18 berikut ini:

Gambar 18. Data Realisasi Belanja Per Jenis Kegiatan

3. Untuk rekomendasi terkait dengan rencana penarikan dana pada halaman-III DIPA belum maksimal dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran, akan tetapi secara akumulasi dari seluruh unsur penilaian capaian IKPA BPPMHKP Ambon telah mencapai target bahkan realisasi melebihi target. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian IKPA semester II tahun 2024 sebagaimana gambar 19 :

Gambar 19. Data Indikator Pelaksanaan Anggaran Balai KIPM Ambon

Laporan Kinerja BPPMHKP Ambon tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban tertulis kepada pemberi wewenang serta dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan sehingga terbentuknya pemerintahan yang baik (good governance), selain itu Laporan Kinerja juga diharapkan dapat menjadi sumbangsih penting dalam penyusunan dan implementasi Rencana Kerja (Operational Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Rencana Anggaran (Financial Plan), dan Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

Ambon, 12 Januari 2025

Kepala BKIPM Ambon

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON
REPUBLIK INDONESIA

Muhammad Hatta Arisandi

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. **Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Balai KIPM Ambon**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4135 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513252
LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Muhammad Hatta Arisandi**
Jabatan : Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, Ambon

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Ishartini**
Jabatan : Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon
Ishartini	**Muhammad Hatta Arisandi**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BALAI KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN AMBON

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Pengendalian dan pengawasan mutu Hasil Kelautan Perikanan	1	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi primer yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70
		2	Persentase hasil kelautan dan perikanan sektor produksi pasca panen yang memenuhi standar mutu dan keamanan pangan lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70
		3	Persentase pengawasan mutu hasil perikanan di wilayah RI lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70
		4	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	99
SK.2	Pengendalian sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan yang konsisten sesuai standar	5	Nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan Lembaga inspeksi lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	70
SK.3	Terselenggaranya Tata Kelola Pemerintahan yang baik lingkup Balai KIPM Ambon	6	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan UPT Balai KIPM Ambon (Indeks)	3,36
		7	Indeks Profesionalitas ASN lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Indeks)	86
		8	Nilai penilaian mandiri SAKIP lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	82
		9	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	71
		10	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) lingkup UPT Balai KIPM Ambon (Nilai)	93,76
		11	Penyelesaian temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	100
		12	Persentase rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Balai KIPM Ambon (%)	80
		13	Tingkat kepatuhan pengadaan barang/ jasa lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	80
		14	Tingkat kepatuhan BMN lingkup UPT Balai KIPM Ambon (%)	80

Data Anggaran

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	4.639.126.000
2.	Manajemen Mutu	633.500.000
3.	Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	346.000.000
Total Anggaran Balai KIPM Ambon Tahun 2024		**5.618.626.000**

Jakarta, 1 Oktober 2024

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan	Kepala Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon
Ishartini	**Muhammad Hatta Arisandi**

Lampiran 2. **Rekapitulasi Data Inspeksi dan Sertifikasi CPIB Tahun 2024**

REKAPITULASI DATA INSPEKSI SERTIFIKASI CPIB
TW IV BALAI KIPM AMBON TAHUN 2024

NO	NAMA HATCHERY	JENIS IKAN	KEGIATAN BUDIDAYA	LOKSI BUDIDAYA	TITIK KOORDINAT	WAKTU PELAKSANAAN	NOMOR SERTIFIKAT
1.	PT. Mahana Lestari Investama	Bandi Udang Vannamei	Pembenihan Ikan Air Payau	Desa Malaku Kec. Sesaria Utara Kab. Maluku Tengah - Maluku	2,798754°S,128,369449°E	23 Desember 2024	91202023980330000001
2.	BBAT Maku	Nila Lele	Pembenihan Ikan Air Tawar	Maku, Ba. Waropi Kab. Inpra	3,368269 °S,126,068382°E	18 Desember 2024	Dalam Proses

Mengetahui
Kepala Balai KIPM Ambon

Muhammad Hatta Arisandi

Penanggungjawab
Kelompok Primer

Hibban Suneth

REKAPITULASI DATA INSPEKSI SERTIFIKASI CPIB KAPAL
TW IV BALAI KIPM AMBON TAHUN 2024

NO	NAMA KAPAL	JENIS KAPAL	UKURAN KAPAL (GT)	WAKTU PELAKSANAAN	NOMOR SERTIFIKAT	KET.
1.	KM. Maya Mandiri 17	Penangkap	29 GT	10 Desember 2024	Dalam Proses	
2.	KM. Maya Mandiri 15	Penangkap	29 GT	17 Desember 2024	Dalam Proses	
3.	KM. Maya Mandiri 12	Penangkap	29 GT	17 Desember 2024	Dalam Proses	
4.	KM. Maluku Prima Makmur 128	Penangkap	30 GT	27 Desember 2024	Dalam Proses	
5.	KM. Maluku Prima Makmur 02	Penangkap	29 GT	28 Desember 2024	Dalam Proses	

Mengetahui
Kepala Balai KIPM Ambon

Muhammad Hatta Arisandi

Penanggungjawab
Kelompok Primer

Hibban Suneth

Lampiran 3. **Rekapitulasi Data Ruang Lingkup UPI di Balai KIPM Ambon Tahun 2024**

REKAPITULASI DATA RUANG LINGKUP DI UPI BPPMHKP TAHUN 2024

NO	NAMA UPI	NAMA KOTA / KABUPATEN	NAMA PEMILIK	ALAMAT	RUANG LINGKUP	GROUP	NOMOR SERTIFIKAT HACCP	MASA BERLAKU HACCP	STATUS
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					2 [illegible]	[illegible]	[illegible]		
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	3 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					4 [illegible]	[illegible]	[illegible]		
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					6 [illegible]	[illegible]	[illegible]		
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					8 [illegible]	[illegible]	[illegible]		
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					10 [illegible]	[illegible]	[illegible]		
					11 [illegible]	[illegible]	[illegible]		
					12 [illegible]	[illegible]	[illegible]		
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	13 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					14 [illegible]	[illegible]	[illegible]		
					15 [illegible]	[illegible]	[illegible]		
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	16 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	17 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					18 [illegible]	[illegible]	[illegible]		
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	19 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					20 [illegible]	[illegible]	[illegible]		
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	21 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					22 [illegible]	[illegible]	[illegible]		
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	23 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					24 [illegible]	[illegible]	[illegible]		
					25 [illegible]	[illegible]	[illegible]		
					26 [illegible]	[illegible]	[illegible]		
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	27 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	28 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	29 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					30 [illegible]	[illegible]	[illegible]		
					31 [illegible]	[illegible]	[illegible]		
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	32 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					33 [illegible]	[illegible]	[illegible]		
					34 [illegible]	[illegible]	[illegible]		
					35 [illegible]	[illegible]	[illegible]		
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	36 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					37 [illegible]	[illegible]	[illegible]		
					38 [illegible]	[illegible]	[illegible]		
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	39 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					40 [illegible]	[illegible]	[illegible]		
18	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	41 [illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					42 [illegible]	[illegible]	[illegible]		

[illegible], [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible]

Lampiran 4. **Laporan Kegiatan Monev Kesegaran Ikan pada Sentra Penjualan Ikan di Kota Ambon**

LAPORAN

KEGIATAN PENGAWASAN MUTU
MONITORING KESEGARAN IKAN PADA SENTRA PENJUALAN IKAN
DI KOTA AMBON

1.2 Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan monitoring kesegaran ikan berdasarkan :

1. Undang Undang Nomor . 45/2009 tentang Perikanan
2. Peraturan Pemerintah Nomor . 57/PP/2017 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
3. Instruksi Presiden Nomor . 01/2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan monitoring kesegaran ikan adalah :

1. Mendapatkan data dan informasi tentang tingkat kesegaran ikan, cemaran bahan kimia, mikrobiologi dan logam berat.
2. Implementasi INPRES Nomor. 01/2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING

2.1 Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan terdiri dari Inspektur mutu BPPMHKP Ambon, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon dan Kepala Pasar Mardika Kota Ambon.

2.2 Waktu dan Lokasi

Kegiatan monitoring kesegaran ikan dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 27 Desember 2024 bertempat di Pasar Ikan Batu Merah Kota Ambon.

2.3. Metode

- Sampel ikan segar/basah diambil dan dimasukkan ke dalam *cool box* yang berisi es.
- Sampel air dan es dimasukkan ke dalam kantong plastik kemudian dimasukkan ke dalam *cool box*
- Pengujian organoleptik, merupakan cara pengujian dengan menggunakan indra manusia sebagai alat utama untuk mengukur kemunduran mutu, indikasi kebusukan dan kerusakan komoditas perikanan.
- Pengujian mikrobiologi, meliputi pengujian bakteri *Escherichia coli* dengan mengacu pada ISO 16649.3:2015 dan pengujian bakteri *Salmonella* sp. dengan mengacu pada SNI ISO 6579:2015.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pengujian mikrobiologi yang dilakukan di laboratorium uji **BPPMHKP** Ambon ditemukan pada sampel jenis ikan cakalang, ikan kerapu, ikan kembung, ikan Layang, Cumi dan Air serta Es yang dilakukan uji Mikrobiologi menuntujukan hasil Negatif dan Hasil pengujian organoleptik sesuai SNI 2346-2015 pada lembar score sheet ikan segar sesuai Acuan SNI 2729-2013 Adapun parameter yang di uji meliputi Mata, Insang, Lendir, daging, Bau dan tekstur dengan hasil berkisar 7 – 8 hasil tersebut menunjukan kualitas mutu produk sangat baik sesuai persyaratan mutu yang di tetapkanatau memenuhi persyaratan mutu.

Tabel 1. Hasil Pengujian Bakteri *Escherichia coli* dan *Salmonella* sp. pada sampel ikan, air dan es.

NO	Jenis Sampel	Jenis Parameter	Persyaratan Mutu	Hasil Pengujian	Spesifikasi Metode
1.	Ikan Cakalang	*Escherichia coli*	< 3.0 APM/gr	10 mpm/25 gr	ISO 16649.3: 2015
		Salmonella sp.	Negatif/25 gr	Negatif	SNI ISO 6579:2015
2	Ikan Layang	*Escherichia coli*	< 3.0 APM/gr	10 mpm/25 gr	ISO 16649.3: 2015
		Salmonella sp.	Negatif/25 gr	Negatif	SNI ISO 6579:2015
3	Ikan Kembung	*Escherichia coli*	< 3.0 APM/gr	10 mpm/25 gr	ISO 16649.3: 2015
		Salmonella sp.	Negatif/25 gr	Negatif	SNI ISO 6579:2015
4.	Ikan Kerapu	*Escherichia coli*	< 3.0 APM/gr	10 mpm/25 gr	ISO 16649.3: 2015
		Escherichia coli	< 3.0 APM/gr	10 mpm/25 gr	ISO 16649.3: 2015
5.	Cimi-Cumi	*Escherichia coli*	< 3.0 APM/gr	10 mpm/25 gr	ISO 16649.3: 2015
		Escherichia coli	< 3.0 APM/gr	10 mpm/25 gr	ISO 16649.3: 2015
4	Air	*Escherichia coli*	0/100ml	0/ 100 ml	ISO 9308.3: 2010
5	Es	*Escherichia coli*	0/100ml	0/ 100 ml	ISO 93.08.3: 2010

Bakteri *Escherichia coli* adalah salah satu jenis spesies utama bakteri gram negatif yang biasa hidup di dalam usus manusia dan hewan. Kebanyakan bakteri *Escherichia coli* tidak berbahaya dan merupakan bagian penting dari usus yang sehat. Namun beberapa varietas bakteri *Escherichia coli* O157:H7 bersifat pathogen, yaitu dapat menyebabkan penyakit. Infeksi bakteri *Escherichia coli* dapat menghasilkan racun yang mampu merusak dinding usus kecil yang mengakibatkan kram perut, diare yang bercampur dengan darah dan demam. Makanan dan air yang terkontaminasi adalah penyebab umum terjadinya infeksi bakteri *Escherichia coli*, juga mengkonsumsi makanan yang dimasak tidak matang.

Hasil pengujian sampel ikan cakalang menunjukan hasil positif atau terkontaminasi bakteri *Salmonella* sp., sedangkan sampel ikan layang, ikan kembung menunjukan hasil yang negatif.

Bakteri *Salmonella* sp. merupakan bakteri pathogen penyebab penyakit seperti *typus*, diare, sakit kepala, demam dan disentri yang dapat menyebabkan kematian. Penyebaran bakteri *Salmonella* dapat melalui hewan peliharaan hingga manusia, cara penularan yang paling sering adalah melalui *feces* dari orang-orang yang terinfeksi sehingga menceman sumber air atau makanan orang-orang yang tidak terinfeksi.

IV. KESIMPULAN

Hasil pengujian Organoleptik dan Mikrobiologi pada produk ikan cakalang, ikan layang, Ikan kembung, ikan kerapu, Air dan Es menunjukan hasil Negatif atau memenuhi persyaratan mutu sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat.

Rekomendasi :

1. Sarana dan prasana di pasar tradisional mardika Ambon sudah cukup baik tersedia Air bersih yang memadai, toilet, penanganan limbah cukup baik,musholah, tempat cuci tangan, BAK sampah, Area parkir dan fasilitas lainnya, para pedagang ikan telah menerapkan cara penanganan ikan yang baik (CPIB) serta melaksanakan sanitasi yang baiksehingga produk dapat terhindar dari kontaminasi. Namun perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :
   a. Minimnya ketersediaan sarana prasarana berupa konstruksi bangunan dan lay out yang memadai (sesuai standar).
   b. Perlu perbaikan dan penambahan fasilitas sanitasi, toilet, peralatan yang kontak langsung dengan komoditas hasil perikanan.
   c. Tersedianya fasilitas es dan air bersih, baik air laut maupun air tawar yang dapat digunakan untuk kebutuhan produk perikanan
   d. Sanitasi lingkungan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan pelaku usaha.

DOKUMENTASI KEGIATAN

Lampiran 5. **Daftar Sertifkasi Mutu dan Daftar Import Refusal Tahun 2024**

DAFTAR SERTIFIKAT MUTU TRIWULAN I 2024

No	No. PPKI	No. Sertifikat	Komoditi	Jumlah	Satuan	UPI	Negara Tujuan
1	E/E/39.0/2024/0103/000001	39.0-00001-2024	FRESH WHOLE TUNA	3377	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
2	E/E/39.0/2024/0103/000003	39.0-00002-2024	FRESH WHOLE TUNA	3021	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
3	E/E/39.0/2024/0103/000004	39.0-00003-2024	FRESH WHOLE TUNA	4054	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
4	E/E/39.0/2024/0103/000007	39.0-00004-2024	Swordfish	1403	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
5	E/E/39.0/2024/0109/000010	39.0-00005-2024	FRESH WHOLE TUNA	2377	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
6	E/E/39.0/2024/0109/000011	PB/KI-01/39.01/2024/000006	Grouper	100000	kg	PT. Kreasi Hiroshi Indonesia	Ghana
7	E/E/39.0/2024/0109/000012	39.0-00006-2024	Tuna Loin Beku	13335.4	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
8	E/E/39.0/2024/0109/000013	39.0-00007-2024	FRESH WHOLE TUNA	1844	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
9	E/E/39.0/2024/0109/000014	39.0-00008-2024	FRESH WHOLE TUNA	3291	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
10	E/E/39.0/2024/0109/000015	39.0-00009-2024	Swordfish	427	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
11	E/E/39.0/2024/0109/000016	39.0-00010-2024	FRESH WHOLE TUNA	2265	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
12	E/E/39.0/2024/0109/000017	39.0-00011-2024	FRESH WHOLE TUNA	3265	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
13	E/E/39.0/2024/0109/000018	39.0-00012-2024	FRESH WHOLE TUNA	972	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
14	E/E/39.0/2024/0110/000019	39.0-00013-2024	Tuna Fresh	536.4	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	United States
15	E/E/39.0/2024/0110/000020	39.0-00014-2024	FRESH WHOLE TUNA	2301	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
16	E/E/39.0/2024/0110/000021	39.0-00015-2024	FRESH WHOLE TUNA	1095	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
17	E/E/39.0/2024/0112/000025	39.0-00016-2024	Tuna Fresh	1045.1	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	United States
18	E/E/39.0/2024/0112/000026	39.0-00017-2024	FRESH WHOLE TUNA	1488	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
19	E/E/39.0/2024/0112/000027	39.0-00018-2024	FRESH WHOLE TUNA	2332	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
20	E/E/39.0/2024/0114/000028	PB/KI-01/39.01/2024/000010	Tuna Loin Beku	13214	kg	PT. Harta Samudra	Thailand
21	E/E/39.0/2024/0115/000031	39.0-00019-2024	FRESH WHOLE TUNA	4591	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
22	E/E/39.0/2024/0115/000032	39.0-00020-2024	FRESH WHOLE TUNA	3729	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
23	E/E/39.0/2024/0117/000037	39.0-00021-2024	Tuna Loin Beku	25994.9	kg	PT. Anaka Sumber Tata Bahari (ASTB)	Vietnam
24	E/E/39.0/2024/0117/000038	39.0-00022-2024	FRESH WHOLE TUNA	853	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
25	E/E/39.0/2024/0117/000039	39.0-00023-2024	Tuna Fresh	956.6	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	United States
26	E/E/39.0/2024/0119/000040	39.0-00024-2024	Tuna Saku beku	17979.4	kg	PT. Maluku Prima Sukses	United States
27	E/E/39.0/2024/0119/000041	39.0-00025-2024	Tuna Saku beku	7672.6	kg	PT. Maluku Prima Sukses	United States
28	E/E/39.0/2024/0115/000042	PB/KI-01/39.01/2024/000017	Frozen Yellowfin Tuna With Filleted Woodpecker	13214	kg	PT. Harta Samudra	Thailand
29	E/E/39.0/2024/0122/000045	39.0-00026-2024	Tuna Fresh	1163	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	United States
30	E/E/39.0/2024/0122/000046	39.0-00027-2024	FRESH WHOLE TUNA	1334	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
31	E/E/39.0/2024/0126/000052	39.0-00028-2024	FROZEN VANNAMEI SHRIMP	1307660	kg	PT. WAHANA LESTARI INVESTAMA	China
32	E/E/39.0/2024/0129/000053	39.0-00029-2024	Tuna Fresh	1120.6	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	United States
33	E/E/39.0/2024/0129/000056	PB/KI-01/39.01/2024/000027	Ikan Kuit Pasir	10	kg	PT. Kreasi Hiroshi Indonesia	Singapore
34	E/E/39.0/2024/0130/000057	39.0-00030-2024	FRESH WHOLE TUNA	2024	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
35	E/E/39.0/2024/0130/000058	39.0-00031-2024	FRESH WHOLE TUNA	108	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
36	E/E/39.0/2024/0130/000059	39.0-00032-2024	FRESH WHOLE TUNA	2996	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
37	E/E/39.0/2024/0130/000060	39.0-00033-2024	Swordfish	620	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
38	E/E/39.0/2024/0202/000062	39.0-00034-2024	Tuna Loin Beku	13346.8	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
39	E/E/39.0/2024/0202/000063	39.0-00035-2024	Tuna Loin Beku	26004.7	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
40	E/E/39.0/2024/0209/000069	39.0-00036-2024	Swordfish	326	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
41	E/E/39.0/2024/0209/000070	39.0-00037-2024	FRESH WHOLE TUNA	3276	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
42	E/E/39.0/2024/0209/000071	39.0-00038-2024	Tuna Fresh	1195.2	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	United States
43	E/E/39.0/2024/0210/000072	39.0-00039-2024	FRESH WHOLE TUNA	2928	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
44	E/E/39.0/2024/0215/000074	39.0-00040-2024	Tuna Saku beku	6489.6	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
45	E/E/39.0/2024/0217/000077	39.0-00041-2024	FRESH WHOLE TUNA	1057	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
46	E/E/39.0/2024/0217/000078	39.0-00042-2024	FRESH WHOLE TUNA	1647	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
47	E/E/39.0/2024/0217/000079	39.0-00043-2024	Tuna Fresh	554.6	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	United States
48	E/E/39.0/2024/0219/000080	39.0-00044-2024	Tuna Saku beku	6991.6	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
49	E/E/39.0/2024/0221/000084	39.0-00045-2024	Swordfish	220	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
50	E/E/39.0/2024/0221/000085	39.0-00046-2024	FRESH WHOLE TUNA	1758	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
51	E/E/39.0/2024/0222/000086	39.0-00047-2024	Tuna Saku beku	6991.6	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
52	E/E/39.0/2024/0226/000089	39.0-00048-2024	FRESH WHOLE TUNA	1388	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
53	E/E/39.0/2024/0229/000093	39.0-00049-2024	Swordfish	668	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
54	E/E/39.0/2024/0229/000094	39.0-00050-2024	Tuna Fresh	554.4	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	United States
55	E/E/39.0/2024/0229/000095	39.0-00051-2024	Tuna Fresh	1134.2	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	United States
56	E/E/39.0/2024/0304/000100	39.0-00052-2024	Swordfish	299	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
57	E/E/39.0/2024/0304/000101	39.0-00054-2024	Swordfish	537	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
58	E/E/39.0/2024/0304/000102	39.0-00053-2024	FRESH WHOLE TUNA	1058	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
59	E/E/39.0/2024/0305/000103	39.0-00054-2024	Tuna beku	20	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
60	E/E/39.0/2024/0305/000104	PB/KI-01/39.01/2024/000049	Ikan Baby Tuna Beku	2	kg	PT. Kreasi Hiroshi Indonesia	Singapore
61	E/E/39.0/2024/0305/000105	39.0-00055-2024	FRESH WHOLE TUNA	1371	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
62	E/E/39.0/2024/0309/000106	39.0-00057-2024	FROZEN VANNAMEI SHRIMP	943368	kg	PT. WAHANA LESTARI INVESTAMA	China
63	E/E/39.0/2024/0307/000107	39.0-00058-2024	Tuna Ground Meat Beku	17979.4	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States

LAPORAN IMPORT REFUSAL BULAN JANUARI 2024
BALAI KIPM AMBON

NO.	NEGARA TUJUAN	JUMLAH KASUS PENOLAKAN												KET
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Jepang	-												
2	Singapura	-												
3	Ghana	-												
4	Thailand	-												
5	China	-												
6	Amerika	-												
7	Vietnam	-												

Mengetahui
Kepala Balai KIPM Ambon
Muhammad Hatta Arsyandi

Kepala Seksi PMKHP
Hilda Maduhun

LAPORAN IMPORT REFUSAL BULAN FEBRUARI 2024
BALAI KIPM AMBON

NO.	NEGARA TUJUAN	JUMLAH KASUS PENOLAKAN												KET
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	
1	JEPANG		-											
2	AMERIKA		-											
3	VIETNAM		-											

Mengetahui
Kepala Balai KIPM Ambon
Muhammad Hatta Arsyandi

Kepala Seksi PMKHP
Hilda Maduhun

LAPORAN IMPORT REFUSAL BULAN MARET 2024
BALAI KIPM AMBON

NO.	NEGARA TUJUAN	JUMLAH KASUS PENOLAKAN												KET
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	
1	SINGAPURA			-										
2	AMERIKA			-										
3	JEPANG			-										
4	VIETNAM			-										
5	CHINA			-										
6	THAILAND			-										
7	ENGRA			-										

Mengetahui
Kepala Balai KIPM Ambon
Muhammad Hatta Arsyandi

Kepala Seksi PMKHP
Hilda Maduhun

DAFTAR SERTIFIKAT MUTU TRIWULAN II 2024

No	No. PPK	No. Sertifikat	Komoditi	Jumlah	Satuan	UPI	Negara Tujuan
1	E/E/39.0/20240401/000162	39.0-00082-2024	Tuna Loin Beku	13225.37	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
2	E/E/39.0/20240402/000162	39.0-00083-2024	FRESH WHOLE TUNA	1429	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
3	E/E/39.0/20240403/000163	PSKI-D/1/39.0/IV/2024/000080	Ikan Baby Tuna Beku	35	kg	PT. Kreasi Himono Indonesia	Thailand
4	E/E/39.0/20240405/000166	39.0-00084-2024	FRESH WHOLE TUNA	4488	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
5	E/E/39.0/20240405/000167	39.0-00085-2024	FRESH WHOLE TUNA	3534	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
6	E/E/39.0/20240405/000168	39.0-00086-2024	FRESH WHOLE TUNA	2593	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
7	E/E/39.0/20240406/000169	39.0-00087-2024	Swordfish	982	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
8	E/E/39.0/20240408/000172	PSKI-D/1/39.0/IV/2024/000083	Ikan Baby Tuna Beku	10	kg	PT. Kreasi Himono Indonesia	Singapore
9	E/E/39.0/20240408/000171	39.0-00088-2024	FRESH WHOLE TUNA	1983	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
10	E/E/39.0/20240408/000173	39.0-00089-2024	FRESH WHOLE TUNA	2572	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
11	E/E/39.0/20240413/000182	39.0-00090-2024	FRESH WHOLE TUNA	2543	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
12	E/E/39.0/20240413/000183	39.0-00091-2024	FRESH WHOLE TUNA	2242	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
13	E/E/39.0/20240417/000187	39.0-00092-2024	Tuna Loin Beku	13225.37	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
14	E/E/39.0/20240418/000188	39.0-00093-2024	Tuna Saku beku	7990.4	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
15	E/E/39.0/20240418/000189	39.0-00094-2024	Tuna Ground Meat Beku	18238.09	kg	PT. Maluku Prima Sukses	United States
16	E/E/39.0/20240419/000192	39.0-00095-2024	FRESH WHOLE TUNA	1914	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
17	E/E/39.0/20240419/000193	39.0-00096-2024	FRESH WHOLE TUNA	1061	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
18	E/E/39.0/20240419/000194	39.0-00097-2024	FRESH WHOLE TUNA	1060	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
19	E/E/39.0/20240420/000197	39.0-00098-2024	FRESH WHOLE TUNA	2632	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
20	E/E/39.0/20240420/000198	39.0-00099-2024	FRESH WHOLE TUNA	2181	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
21	E/E/39.0/20240420/000200	39.0-00100-2024	Swordfish	187	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
22	E/E/39.0/20240423/000201	39.0-00101-2024	FRESH WHOLE TUNA	1004	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
23	E/E/39.0/20240423/000202	39.0-00102-2024	FRESH WHOLE TUNA	2619	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
24	E/E/39.0/20240426/000206	39.0-00103-2024	Tuna Loin Beku	25971.65	kg	PT. Aneka Sumber Tata Bahari (ASTB)	Vietnam
25	E/E/39.0/20240426/000209	39.0-00104-2024	FRESH WHOLE TUNA	4251	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
26	E/E/39.0/20240427/000213	39.0-00105-2024	FRESH WHOLE TUNA	3695	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
27	E/E/39.0/20240427/000214	39.0-00106-2024	FRESH WHOLE TUNA	4195	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
28	E/E/39.0/20240427/000215	39.0-00107-2024	FRESH WHOLE TUNA	1051	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
29	E/E/39.0/20240429/000216	39.0-00108-2024	FRESH WHOLE TUNA	3535	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
30	E/E/39.0/20240429/000217	39.0-00109-2024	FRESH WHOLE TUNA	3067	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
31	E/E/39.0/20240429/000218	39.0-00110-2024	Swordfish	240	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
32	E/E/39.0/20240429/000220	39.0-00111-2024	Tuna Loin Beku	39855.8	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
33	E/E/39.0/20240504/000223	39.0-00112-2024	Tuna Saku beku	7481	kg	PT. Maluku Prima Sukses	United States
34	E/E/39.0/20240504/000224	39.0-00113-2024	FRESH WHOLE TUNA	3484	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
35	E/E/39.0/20240504/000225	39.0-00114-2024	FRESH WHOLE TUNA	3465	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
36	E/E/39.0/20240504/000226	39.0-00115-2024	Tuna Fresh	1139.5	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
37	E/E/39.0/20240504/000227	39.0-00116-2024	FRESH WHOLE TUNA	501	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
38	E/E/39.0/20240504/000228	39.0-00117-2024	FRESH WHOLE TUNA	3575	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
39	E/E/39.0/20240504/000229	39.0-00118-2024	FRESH WHOLE TUNA	2962	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
40	E/E/39.0/20240504/000230	39.0-00119-2024	FRESH WHOLE TUNA	1980	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
41	E/E/39.0/20240508/000234	39.0-00120-2024	Tuna Loin Beku	13951.05	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
42	E/E/39.0/20240508/000235	39.0-00121-2024	Tuna Loin Beku	28075.57	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
43	E/E/39.0/20240508/000236	39.0-00122-2024	FRESH WHOLE TUNA	3931	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
44	E/E/39.0/20240508/000237	39.0-00123-2024	FRESH WHOLE TUNA	4112	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
45	E/E/39.0/20240508/000238	39.0-00124-2024	FRESH WHOLE TUNA	1511	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
46	E/E/39.0/20240507/000240	39.0-00125-2024	Tuna Fresh	1170.5	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
47	E/E/39.0/20240507/000241	39.0-00126-2024	FRESH WHOLE TUNA	1589	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
48	E/E/39.0/20240509/000242	39.0-00127-2024	FRESH WHOLE TUNA	3988	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
49	E/E/39.0/20240509/000243	39.0-00128-2024	FRESH WHOLE TUNA	1478	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
50	E/E/39.0/20240509/000244	39.0-00129-2024	FRESH WHOLE TUNA	1243	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
51	E/E/39.0/20240510/000248	39.0-00130-2024	Tuna Loin Beku	25971.37	kg	PT. Aneka Sumber Tata Bahari (ASTB)	Vietnam
52	E/E/39.0/20240510/000247	39.0-00131-2024	Tuna Fresh	818.5	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
53	E/E/39.0/20240510/000248	39.0-00132-2024	Tuna Fresh	1181.5	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
54	E/E/39.0/20240510/000249	39.0-00133-2024	FRESH WHOLE TUNA	2962	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
55	E/E/39.0/20240510/000250	39.0-00134-2024	FRESH WHOLE TUNA	1517	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
56	E/E/39.0/20240511/000253	39.0-00135-2024	FRESH WHOLE TUNA	3102	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
57	E/E/39.0/20240511/000254	39.0-00136-2024	FRESH WHOLE TUNA	2002	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan

58	E/E/39.0/20240511/000255	39.0-00137-2024	FRESH WHOLE TUNA	3046	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
59	E/E/39.0/20240511/000256	39.0-00138-2024	FRESH WHOLE TUNA	2150	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
60	E/E/39.0/20240513/000259	39.0-00140-2024	FRESH WHOLE TUNA	3180	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
61	E/E/39.0/20240513/000260	39.0-00139-2024	FRESH WHOLE TUNA	1533	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
62	E/E/39.0/20240514/000261	39.0-00141-2024	Tuna Fresh	1128	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
63	E/E/39.0/20240515/000263	39.0-00142-2024	FRESH WHOLE TUNA	3039	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
64	E/E/39.0/20240515/000264	39.0-00143-2024	FRESH WHOLE TUNA	1006	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
65	E/E/39.0/20240517/000265	39.0-00144-2024	Tuna Ground Meat Beku	17479	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
66	E/E/39.0/20240517/000269	39.0-00145-2024	Tuna Loin Beku	26074.62	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
67	E/E/39.0/20240517/000270	39.0-00146-2024	FRESH WHOLE TUNA	1788	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
68	E/E/39.0/20240517/000271	39.0-00147-2024	Tuna Fresh	1146.5	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
69	E/E/39.0/20240518/000273	39.0-00148-2024	FRESH WHOLE TUNA	3935	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
70	E/E/39.0/20240518/000274	39.0-00149-2024	FRESH WHOLE TUNA	1594	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
71	E/E/39.0/20240520/000276	39.0-00150-2024	FRESH WHOLE TUNA	1573	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
72	E/E/39.0/20240521/000277	PBKI-01/39.0/VI/2024/000127	Tuna Loin Beku	2325.86	kg	PT. Harta Samudra	Saudi Arabia
73	E/E/39.0/20240521/000279	39.0-00151-2024	Tuna Fresh	1185	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
74	E/E/39.0/20240521/000280	39.0-00152-2024	FRESH WHOLE TUNA	2333	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
75	E/E/39.0/20240521/000281	39.0-00153-2024	FRESH WHOLE TUNA	1523	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
76	E/E/39.0/20240522/000282	39.0-00154-2024	Tuna Saku beku	4994	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
77	E/E/39.0/20240522/000283	39.0-00155-2024	FRESH WHOLE TUNA	3445	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
78	E/E/39.0/20240522/000284	39.0-00156-2024	FRESH WHOLE TUNA	1034	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
79	E/E/39.0/20240524/000289	39.0-00158-2024	Tuna Fresh	1050.5	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
80	E/E/39.0/20240524/000290	39.0-00157-2024	FRESH WHOLE TUNA	834	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
81	E/E/39.0/20240525/000292	39.0-00159-2024	Tuna Loin Beku	28063.15	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
82	E/E/39.0/20240525/000293	39.0-00160-2024	FRESH WHOLE TUNA	1047	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
83	E/E/39.0/20240525/000294	39.0-00161-2024	FRESH WHOLE TUNA	955	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
84	E/E/39.0/20240528/000302	39.0-00162-2024	Tuna Fresh	1099.5	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
85	E/E/39.0/20240528/000303	39.0-00163-2024	Tuna Fresh	1090.5	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
86	E/E/39.0/20240529/000306	39.0-00164-2024	Tuna Saku beku	10575.2	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
87	E/E/39.0/20240531/000310	39.0-00165-2024	Tuna Loin Beku	12313.58	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
88	E/E/39.0/20240531/000311	39.0-00167-2024	FRESH WHOLE TUNA	2416	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
89	E/E/39.0/20240531/000312	39.0-00166-2024	FRESH WHOLE TUNA	2435	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
90	E/E/39.0/20240601/000313	39.0-00168-2024	Swordfish	175	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
91	E/E/39.0/20240601/000314	39.0-00169-2024	FRESH WHOLE TUNA	1990	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
92	E/E/39.0/20240604/000318	39.0-00170-2024	Tuna Fresh	1164	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
93	E/E/39.0/20240604/000326	39.0-00171-2024	FRESH WHOLE TUNA	3068	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
94	E/E/39.0/20240604/000327	39.0-00172-2024	FRESH WHOLE TUNA	1066	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
95	E/E/39.0/20240607/000334	39.0-00173-2024	Swordfish	139	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
96	E/E/39.0/20240607/000336	39.0-00174-2024	FRESH WHOLE TUNA	1016	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
97	E/E/39.0/20240613/000345	39.0-00175-2024	Tuna Loin Beku	28050.6	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
98	E/E/39.0/20240614/000346	39.0-00176-2024	Tuna Loin Beku	25997.61	kg	PT. Aneka Sumber Tata Bahari (ASTB)	Vietnam
99	E/E/39.0/20240614/000347	39.0-00177-2024	Tuna Saku beku	6991.6	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
100	E/E/39.0/20240618/000357	PBKI-01/39.0/VI/2024/000179	Cumi-Cumi Beku Fillet	30	kg	PT. Kreasi Himono Indonesia	Singapore
101	E/E/39.0/20240618/000358	39.0-00178-2024	Swordfish	678	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
102	E/E/39.0/20240618/000359	PBKI-01/39.0/VI/2024/000194	Kakap merah beku	60	kg	PT. Kreasi Himono Indonesia	Thailand
103	E/E/39.0/20240618/000364	39.0-00179-2024	FRESH WHOLE TUNA	937	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
104	E/E/39.0/20240620/000367	39.0-00180-2024	Tuna Saku beku	10694.48	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
105	E/E/39.0/20240620/000368	39.0-00181-2024	FROZEN VANNAMEI SHRIMP	800400	kg	PT. WAHANA LESTARI INVESTAMA	China

LAPORAN IMPORT REFUSAL BULAN APRIL 2024
BALAI KIPM AMBON

NO.	NEGARA TUJUAN	JUMLAH KASUS PENOLAKAN												KET
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Jepang				-									
2	Singapura				-									
3	Saudi Arabia				-									
4	Thailand				-									
5	China				-									
6	Amerika				-									
7	Vietnam				-									

Mengetahui,
Kepala Balai KIPM Ambon

Muhammad Datta Arisandi

Penanggung Jawab

Lutfi Palembang

LAPORAN IMPORT REFUSAL BULAN MEI 2024
BALAI KIPM AMBON

NO.	NEGARA TUJUAN	JUMLAH KASUS PENOLAKAN												KET
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Jepang					-								
2	Singapura					-								
3	Saudi Arabia					-								
4	Thailand					-								
5	China					-								
6	Amerika					-								
7	Vietnam					-								

Mengetahui,
Kepala Balai KIPM Ambon

Muhammad Datta Arisandi

Penanggung Jawab

Lutfi Palembang

LAPORAN IMPORT REFUSAL BULAN JUNI 2024
BALAI KIPM AMBON

NO.	NEGARA TUJUAN	JUMLAH KASUS PENOLAKAN												KET
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Jepang						-							
2	Singapura						-							
3	Thailand						-							
4	China						-							
5	Amerika						-							
6	Vietnam						-							

Mengetahui,
Kepala Balai KIPM Ambon

Muhammad Hidayatullah

Penanggung Jawab

Iutfi Palembang

DAFTAR SERTIFIKAT MUTU TRIWULAN III 2024

No	No. PPK	Nomor Sertifikat	Komoditi	Jumlah	Satuan	UPI	Negara Tujuan
1	EE/09.0/2024/704/008451	39.0-00192-2024	Tuna Saku beku, Tuna Ground Meat Beku	17270.2	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
2	EE/09.0/2024/706/008469	39.0-00193-2024	FRESH WHOLE TUNA, Swordfish	795	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
3	EE/09.0/2024/715/008431	39.0-00194-2024	Tuna Ground Meat Beku	17479	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
4	EE/09.0/2024/723/008432	PBKI-D1/39.0/VI/2024/008249	Tuna Loin Beku	28039.8	kg	PT. Harta Samudra	Thailand
5	EE/09.0/2024/726/008441	39.0-00196-2024	FRESH WHOLE TUNA, Swordfish	1956	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
6	EE/09.0/2024/726/008442	39.0-00197-2024	FRESH WHOLE TUNA	2186	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
7	EE/09.0/2024/731/008454	39.0-00198-2024	FRESH WHOLE TUNA, Swordfish	2626	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
8	EE/09.0/2024/801/008455	39.0-00199-2024	FRESH WHOLE TUNA	2076	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
9	EE/09.0/2024/801/008456	39.0-00190-2024	Tuna Fresh	1187	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
10	EE/09.0/2024/803/008463	39.0-00191-2024	FRESH WHOLE TUNA, Swordfish	1535	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
11	EE/09.0/2024/808/008468	PBKI-D1/39.0/VIII/2024/008279	Tuna Loin Beku	2845.97	kg	PT. Harta Samudra	Saudi Arabia
12	EE/09.0/2024/809/008469	39.0-00193-2024	Tuna Saku beku, Tuna Ground Meat Beku	17979.4	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
13	EE/09.0/2024/809/008472	39.0-00193-2024	FRESH WHOLE TUNA, Swordfish	1871	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
14	EE/09.0/2024/809/008473	39.0-00194-2024	FRESH WHOLE TUNA	1076	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
15	EE/09.0/2024/813/008483	PBKI-D1/39.0/VIII/2024/008287	Frozen Yellowfin Tuna With Filtered Mixedamoke	28071.1	kg	PT. Harta Samudra	Thailand
16	EE/09.0/2024/814/008481	39.0-00195-2024	FRESH WHOLE TUNA, Swordfish	2440	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
17	EE/09.0/2024/823/008482	39.0-00196-2024	Tuna Loin Beku, Tuna Saku beku, Tuna Cube beku, Tuna Chunk beku, Tuna Ground Meat Beku	19089	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
18	EE/09.0/2024/823/008489	39.0-00197-2024	FRESH WHOLE TUNA, Swordfish	3371	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
19	EE/09.0/2024/824/008502	39.0-00198-2024	FRESH WHOLE TUNA	579	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
20	EE/09.0/2024/826/008504	39.0-00199-2024	FRESH WHOLE TUNA, Swordfish	1484	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
21	EE/09.0/2024/826/008505	39.0-00200-2024	Tuna Loin Beku	28080.9	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
22	EE/09.0/2024/827/008508	39.0-00201-2024	Tuna Fresh	1139.0	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
23	EE/09.0/2024/902/008519	39.0-00202-2024	FRESH WHOLE TUNA, Swordfish	2898	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
24	EE/09.0/2024/903/008520	39.0-00203-2024	FRESH WHOLE TUNA	1736	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
25	EE/09.0/2024/904/008531	39.0-00204-2024	Tuna Loin Beku	27931.1	kg	PT. Anekia Sumber Tata Bahari (ASTB)	Vietnam
26	EE/09.0/2024/906/008527	39.0-00205-2024	Tuna Loin Beku	28080.2	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
27	EE/09.0/2024/906/008535	39.0-00206-2024	Tuna Loin Beku	13025	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
28	EE/09.0/2024/906/008529	39.0-00207-2024	FRESH WHOLE TUNA	3482	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
29	EE/09.0/2024/906/008530	39.0-00208-2024	FRESH WHOLE TUNA	1584	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
30	EE/09.0/2024/908/008531	PBKI-D1/39.0/IX/2024/008324	Cumi-Cumi Beku Filet, Cakalang Beku	198	kg	PT. Kinasi Hinomo Indonesia	Thailand
31	EE/09.0/2024/908/008533	39.0-00209-2024	FRESH WHOLE TUNA	3628	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
32	EE/09.0/2024/908/008534	39.0-00210-2024	FRESH WHOLE TUNA	1987	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
33	EE/09.0/2024/913/008542	39.0-00211-2024	FROZEN WANNAMEI SHRIMP	10000.00	kg	PT. WAHANA LESTARI INVESTAMA	China
34	EE/09.0/2024/914/008543	39.0-00212-2024	FRESH WHOLE TUNA	4194	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
35	EE/09.0/2024/914/008544	39.0-00213-2024	FRESH WHOLE TUNA	1786	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
36	EE/09.0/2024/917/008545	39.0-00214-2024	FRESH WHOLE TUNA, Swordfish	3635	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
37	EE/09.0/2024/917/008546	39.0-00215-2024	FRESH WHOLE TUNA	1286	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
38	EE/09.0/2024/917/008547	39.0-00216-2024	FRESH WHOLE TUNA	1533	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
39	EE/09.0/2024/920/008548	39.0-00217-2024	Tuna Loin Beku	28080.3	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
40	EE/09.0/2024/921/008549	39.0-00218-2024	FRESH WHOLE TUNA, Swordfish	3331	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
41	EE/09.0/2024/921/008550	39.0-00219-2024	FRESH WHOLE TUNA	1251	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
42	EE/09.0/2024/924/008551	39.0-00220-2024	FRESH WHOLE TUNA, Swordfish	3416	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
43	EE/09.0/2024/924/008552	39.0-00221-2024	FRESH WHOLE TUNA	1046	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
44	EE/09.0/2024/925/008553	39.0-00222-2024	FRESH WHOLE TUNA, Swordfish	2241	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
45	EE/09.0/2024/925/008554	39.0-00223-2024	FRESH WHOLE TUNA	741	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
46	EE/09.0/2024/926/008558	39.0-00224-2024	FRESH WHOLE TUNA	1093	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
47	EE/09.0/2024/926/008559	39.0-00225-2024	FRESH WHOLE TUNA, Swordfish	2088	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan
48	EE/09.0/2024/926/008560	39.0-00226-2024	Tuna Fresh	1134	kg	PT. Peduli Laut Maluku	United States
49	EE/09.0/2024/926/008561	39.0-00227-2024	FRESH WHOLE TUNA	1288	kg	PT. Peduli Laut Maluku	Japan

LAPORAN IMPORT REFUSAL BULAN JULI 2024
BALAI KIPM AMBON

NO.	NEGARA TUJUAN	JUMLAH KASUS PENOLAKAN												KET
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Jepang							-						
2	Amerika							-						

Luft Palembang

LAPORAN IMPORT REFUSAL BULAN AGUSTUS 2024
BALAI KIPM AMBON

NO.	NEGARA TUJUAN	JUMLAH KASUS PENOLAKAN												KET
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Jepang								-					
2	Amerika								-					
3	Vietnam								-					

Luft Palembang

LAPORAN IMPORT REFUSAL BULAN SEPTEMBER 2024
BALAI KIPM AMBON

NO.	NEGARA TUJUAN	JUMLAH KASUS PENOLAKAN												KET
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGUST	SEP	OKT	NOP	DES	
1	Jepang									-				
2	China									-				
3	Amerika									-				
4	Vietnam									-				

Luft Palembang

DAFTAR SERTIFIKAT MUTU TRIWULAN IV 2024

No	No. PPN	No. Sertifikat	Komoditi	Jumlah	Satuan	UPI	Negara Tujuan
1	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	Tuna Fresh	3120	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	United States
2	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	3165	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
3	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	1026	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
4	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	Tuna Loin Beku	26893.36	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
5	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	2434	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
6	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	1630	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
7	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	Tuna	[illegible]	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
8	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA, Swordfish	1680	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
9	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	1670	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
10	[illegible]	PSN/-01/39.01/2024/[illegible]	Tuna Loin Beku	1016.64	kg	PT. Harta Samudra	Saudi Arabia
11	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA, Swordfish	4628	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
12	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	Tuna Loin Beku	27515.56	kg	PT. Aneka Sumber Tata Bahari (ASTB)	Vietnam
13	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	3110	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
14	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	1130	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
15	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	Tuna Loin Beku	3607.4	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
16	[illegible]	PSN/-01/39.01/2024/[illegible]	SURIMI BEKU	10822.0	kg	PT CELEBES OCEAN FISHERIES	Mexico
17	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	3681	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
18	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	1180	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
19	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA, Swordfish	3029	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
20	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	1320	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
21	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	Tuna Fresh	3110	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	United States
22	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	2120	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
23	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	950	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
24	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	2084	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
25	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	Tuna Loin Beku	13389.56	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
26	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	1041	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
27	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	Ikan Kayu	6180	kg	UD. Rizky Fattah Kamus Maluku Barokah	Korea (South)
28	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	4720	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
29	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	1180	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
30	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FROZEN WANNAMEI SHRIMP	12280.40	kg	PT. WAHANA LESTARI INVESTAMA	China
31	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	1021	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
32	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	921	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
33	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	1043	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
34	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	1032	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
35	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	3035	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
36	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	973	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
37	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	Tuna Loin Beku	26987.48	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
38	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	Tuna Saku beku, Tuna Cube Beku	17670.4	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
39	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	Tuna Loin Beku	26893.31	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
40	[illegible]	PSN/-01/39.01/2024/[illegible]	SURIMI BEKU	15840.00	kg	PT CELEBES OCEAN FISHERIES	Mexico
41	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	Tuna Fresh	1157.0	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	United States
42	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	3681	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
43	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	971	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
44	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	Tuna Ground Meat Beku, Tuna Saku beku, Tuna Cube Beku, Tuna Loin Beku	20234.3	kg	PT. Lumbung Ikan Maluku	United States
45	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	3670	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
46	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	3672	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
47	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	1970	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
48	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	Tuna Fresh	1118.8	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	United States
49	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	Tuna Loin Beku	26943.32	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
50	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	2020	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
51	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	1027	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
52	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	1001	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
53	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	2084	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
54	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	3100	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
55	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	1092	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan
56	[illegible]	38.0-00[illegible]-2024	FRESH WHOLE TUNA	2020	kg	PT. Pedoli Laut Maluku	Japan

57	EE/39.3/2024/1/0/000622	39.0-00295-2024	FRESH WHOLE TUNA	2430	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
58	EE/39.3/2024/1/0/000623	39.0-00296-2024	FRESH WHOLE TUNA	970	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
59	EE/39.3/2024/1/0/000624	39.0-00297-2024	FRESH WHOLE TUNA	2430	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
60	EE/39.3/2024/1/0/000625	39.0-00298-2024	Tuna Fresh	2017.5	kg	PT. Pedut Laut Maluku	United States
61	EE/39.3/2024/1/1/000626	39.0-00299-2024	Tuna Loin Beku	13343.15	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
62	EE/39.3/2024/1/1/000627	39.0-00300-2024	Tuna Fresh	1101.5	kg	PT. Pedut Laut Maluku	United States
63	EE/39.3/2024/1/1/000628	39.0-00301-2024	FRESH WHOLE TUNA	2592	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
64	EE/39.3/2024/1/1/000629	39.0-00302-2024	FRESH WHOLE TUNA	999	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
65	EE/39.3/2024/1/1/000640	39.0-00303-2024	Tuna Loin Beku	26001.97	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
66	EE/39.3/2024/1/1/000641	39.0-00304-2024	FRESH WHOLE TUNA	2031	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
67	EE/39.3/2024/1/1/000642	39.0-00305-2024	FRESH WHOLE TUNA	936	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
68	EE/39.3/2024/1/1/000643	39.0-00306-2024	FRESH WHOLE TUNA	2006	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
69	EE/39.3/2024/1/1/000644	39.0-00307-2024	FRESH WHOLE TUNA	776	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
70	EE/39.3/2024/1/1/000645	39.0-00308-2024	Tuna Fresh	1136	kg	PT. Pedut Laut Maluku	United States
71	EE/39.3/2024/1/1/000646	39.0-00309-2024	Tuna Saku beku, Tuna Ground Meat Beku	17979.4	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
72	EE/39.3/2024/1/2/000647	PB/KI-D1/39.0/XII/2024/000349	Tuna Loin Beku	1830.2	kg	PT. Harta Samudra	Saudi Arabia
73	EE/39.3/2024/1/2/000648	39.0-00310-2024	Tuna Fresh	1156	kg	PT. Pedut Laut Maluku	United States
74	EE/39.3/2024/1/2/000649	39.0-00311-2024	FRESH WHOLE TUNA	2949	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
75	EE/39.3/2024/1/2/000650	39.0-00312-2024	FRESH WHOLE TUNA	1155	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
76	EE/39.3/2024/1/2/000651	39.0-00313-2024	FRESH WHOLE TUNA	1892	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
77	EE/39.3/2024/1/2/000652	39.0-00314-2024	FRESH WHOLE TUNA	1125	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
78	EE/39.3/2024/1/2/000653	39.0-00315-2024	Tuna Loin Beku	28929.48	kg	PT. Aneka Sumber Tata Bahari (ASTB)	Vietnam
79	EE/39.3/2024/1/2/000654	39.0-00316-2024	Tuna Loin Beku	28987.35	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
80	EE/39.3/2024/1/2/000655	39.0-00317-2024	FROZEN VANNAMEI SHRIMP	994000	kg	PT. WAHANA LESTARI INVESTAMA	China
81	EE/39.3/2024/1/2/000656	39.0-00318-2024	FRESH WHOLE TUNA	3149	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
82	EE/39.3/2024/1/2/000657	39.0-00319-2024	FRESH WHOLE TUNA	1522	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
83	EE/39.3/2024/1/2/000658	39.0-00320-2024	Tuna Fresh	1194	kg	PT. Pedut Laut Maluku	United States
84	EE/39.3/2024/1/2/000659	39.0-00321-2024	FRESH WHOLE TUNA	3233	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
85	EE/39.3/2024/1/2/000660	39.0-00322-2024	FRESH WHOLE TUNA	3419	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
86	EE/39.3/2024/1/2/000661	39.0-00323-2024	FRESH WHOLE TUNA	992	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
87	EE/39.3/2024/1/2/000662	39.0-00324-2024	FRESH WHOLE TUNA	3194	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
88	EE/39.3/2024/1/3/000663	39.0-00325-2024	FRESH WHOLE TUNA	3432	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
89	EE/39.3/2024/1/3/000664	39.0-00326-2024	FRESH WHOLE TUNA	572	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
90	EE/39.3/2024/1/3/000665	39.0-00327-2024	Tuna Loin Beku	13333.94	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
91	EE/39.3/2024/1/3/000666	39.0-00328-2024	FRESH WHOLE TUNA	3001	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
92	EE/39.3/2024/1/3/000667	39.0-00329-2024	FRESH WHOLE TUNA	881	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
93	EE/39.3/2024/1/3/000668	39.0-00330-2024	FRESH WHOLE TUNA	2597	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
94	EE/39.3/2024/1/3/000669	39.0-00331-2024	FRESH WHOLE TUNA	1495	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
95	EE/39.3/2024/1/3/000670	39.0-00332-2024	FRESH WHOLE TUNA	3613	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
96	EE/39.3/2024/1/3/000671	39.0-00333-2024	FRESH WHOLE TUNA	1210	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
97	EE/39.3/2024/1/3/000672	39.0-00334-2024	Tuna Saku beku, Tuna Chunk Beku	18880.8	kg	PT. Maluku Prima Makmur	United States
98	EE/39.3/2024/1/3/000673	39.0-00335-2024	FRESH WHOLE TUNA	2832	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
99	EE/39.3/2024/1/3/000674	39.0-00336-2024	FRESH WHOLE TUNA	1477	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
100	EE/39.3/2024/1/3/000675	39.0-00337-2024	Tuna Loin Beku	28088.12	kg	PT. Harta Samudra	Vietnam
101	EE/39.3/2024/1/3/000676	39.0-00338-2024	Tuna Fresh	1117.5	kg	PT. Pedut Laut Maluku	United States
102	EE/39.3/2024/1/3/000677	39.0-00339-2024	FRESH WHOLE TUNA	1355	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
103	EE/39.3/2024/1/3/000678	39.0-00340-2024	FRESH WHOLE TUNA	1536	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
104	EE/39.3/2024/1/3/000679	39.0-00341-2024	Tuna Fresh	1121	kg	PT. Pedut Laut Maluku	United States
105	EE/39.3/2024/1/3/000680	39.0-00342-2024	FRESH WHOLE TUNA	969	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
106	EE/39.3/2024/1/3/000681	39.0-00343-2024	FRESH WHOLE TUNA	1226	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
107	EE/39.3/2024/1/4/000682	39.0-00344-2024	FRESH WHOLE TUNA	860	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
108	EE/39.3/2024/1/4/000683	39.0-00345-2024	FRESH WHOLE TUNA	876	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
109	EE/39.3/2024/1/1/000684	PB/KI-D1/39.0/XII/2024/000349	Tuna Loin Beku	1439.31	kg	PT. Harta Samudra	Saudi Arabia
110	EE/39.3/2024/1/1/000685	39.0-00346-2024	FRESH WHOLE TUNA	1527	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
111	EE/39.3/2024/1/1/000686	39.0-00347-2024	FRESH WHOLE TUNA	538	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
112	EE/39.3/2024/1/1/000687	PB/KI-D1/39.0/XII/2024/000350	Cumi-Cumi Beku Filet	40	kg	PT. Kinaki Hinono Indonesia	Thailand
113	EE/39.3/2024/1/1/000688	39.0-00348-2024	FRESH WHOLE TUNA	1547	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
114	EE/39.3/2024/1/1/000689	39.0-00349-2024	FRESH WHOLE TUNA	516	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
115	EE/39.3/2024/1/1/000690	39.0-00340-2024	FRESH WHOLE TUNA	627	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
116	EE/39.3/2024/1/1/000691	39.0-00341-2024	FRESH WHOLE TUNA	726	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
117	EE/39.3/2024/1/1/000692	39.0-00342-2024	FRESH WHOLE TUNA	4186	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
118	EE/39.3/2024/1/1/000693	39.0-00343-2024	FRESH WHOLE TUNA	1515	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
119	EE/39.3/2024/1/1/000694	39.0-00344-2024	FRESH WHOLE TUNA	3397	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
120	EE/39.3/2024/1/1/000695	39.0-00345-2024	FRESH WHOLE TUNA	876	kg	PT. Pedut Laut Maluku	Japan
121	EE/39.3/2024/1/1/000696	39.0-00346-2024	GAPITA BEKU	17400	kg	PT. Celebes Ocean Fisheries	United States
122	EE/39.3/2024/1/1/000697	39.0-00347-2024	Ikan Kakatua	3400	kg	PT. Celebes Ocean Fisheries	United States

LAPORAN IMPOR REFUSAL BULAN OKTOBER
BALAI KIPM AMBON

No	Negara Tujuan	JUMLAH KASUS PENOLAKAN												Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Jepang										-			
2	Vietnam										-			
3	Amerika										-			
4	Meksiko										-			
5	Korea										-			
6	China										-			

Mengetahui
Kepala Balai KIPM Ambon

Muhammad Hatta Arbandi

Penanggungjawab
Ketua Tim Mutu

Hibban Suneth

LAPORAN IMPOR REFUSAL BULAN NOVEMBER
BALAI KIPM AMBON

No	Negara Tujuan	JUMLAH KASUS PENOLAKAN												Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Jepang											-		
2	Vietnam											-		
3	Amerika											-		
4	China											-		

Mengetahui
Kepala Balai KIPM Ambon

Muhammad Hatta Arbandi

Penanggungjawab
Ketua Tim Mutu

Hibban Suneth

LAPORAN IMPOR REFUSAL BULAN DESEMBER
BALAI KIPM AMBON

No	Negara Tujuan	JUMLAH KASUS PENOLAKAN												Ket
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Ags	Sept	Okt	Nov	Des	
1	Jepang												-	
2	Vietnam												-	
3	Saudi Arabia												-	
4	Thailand												-	

Mengetahui
Kepala Balai KIPM Ambon

Muhammad Hatta Arbandi

Penanggungjawab
Ketua Tim Mutu

Hibban Suneth

Lampiran 6. **Data Capaian IKU Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Tahun 2024**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LAGAK), FAKSIMILE (021) 3513282
LAMAN www.bbp.go.id

Nomor : B.32/BPPMHKP.2/TU.210/I/2025 10 Januari 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Capaian IKU Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi lingkup UPT BPPMHKP

Yth. Seluruh Kepala UPT BPPMHKP

Sehubungan telah selesainya kegiatan Tahun Anggaran 2024, bersama ini kami sampaikan capaian indikator kinerja utama terkait nilai pemenuhan penerapan sistem manajemen mutu laboratorium penguji dan lembaga inspeksi lingkup UPT BPPMHKP, sebagai berikut:

1. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium sebesar **81,35** didapatkan dari 13 laboratorium;
2. Capaian indikator kinerja utama Nilai Kualitas Penerapan Sistem Manajemen Mutu Lembaga Inspeksi sebesar **84,85** didapatkan dari 14 lembaga inspeksi;
3. Berdasarkan data pada poin 1 dan poin 2 maka capaian indikator kinerja utama Nilai Pemenuhan Penerapan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium Penguji dan Lembaga Inspeksi Lingkup UPT BPPMHKP sebesar **83,10**.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Manajemen Mutu

Ditandatangani Secara Elektronik

Woro Nur Endang Sariati

Tembusan:
1. Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
2. Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan.

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

DATA DUKUNG PENERAPAN ISO 17020

KAN

Histori Tindakan Perbaikan LKS

Jenis Asesmen : Lembaga Inspeksi
Nama LS : Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kelas I Ambon
Tanggal Asesmen : -
Tim Asesmen :

Nama Lengkap	Jabatan
Prof.Dr. Sugeng Heri Suseno, S.Pi, M.Si	Kepala

Judul Uraian	Histori Perbaikan			
1. Asesor: Prof.Dr. Sugeng Heri Suseno, S.Pi, M.Si (1) Lembaga inspeksi harus bertanggung jawab atas pengelolaan semua informasi. Personil yang dapat mengakses yaitu ka Sikda (Kasubag Pengembalian) dan pak Hibbar Suseth, S.Pi (Kasubag Pengawasan), Kasie Tata Usaha, Penerima Sampel dan Deputi Kasie Tata Usaha serta Kepala BKIPM dan sudah diatur dalam PKM.2/BKIPM Ambon, tetapi (2) belum ada tanda tangan pada integritas personil penerima sampel dan Deputi Kasie Tata Usaha (3) Siasia Kasie Tata Usaha dan juga Deputi/Deputi Kasie Tata Usaha belum sesuai dengan surat penugasan B.206/BKIPM-AMB/KM.300/II/2024 (2) Penyimpanan data survelen/inspeksi dicetak secara manual (dalam jenset file fisik) dipegang surat ke Sikda) dan secara elektronik dalam komputer, tetapi dalam menjaga kerahasiaan pada laptop yang dipegang ka Sikda dan pak Hibbar belum ada password. Belum memenuhi SNI ISO 17020 klausul 4.2.1 **Status** : Memenuhi **Kategori ketidaksesuaian**: 2 **Klausul ketidaksesuaian** : 4.2.1	No.	Tgl Verifikasi	Tgl Perbaikan	Hasil Verifikasi
	1.	14/10/2024	18/09/2024	VTP 1: Point 8. Nama kasie dan juga deputie kasie belum ada VTP 2: Memenuhi

KAN

2. Asesor: Prof.Dr. Sugeng Heri Suseno, S.Pi, M.Si (1) Lembaga inspeksi harus diorganisasikan dan dikelola untuk memelihara kapabilitas dalam melaksanakan kegiatan inspeksi. Dalam struktur organisasi berdasarkan B.206/BKIPM-AMB/KM.300/II/2024 belum tergambar koordinasi (garis-garis putus) antara kasubag pengendalian dan kasubag pengawasan dimana dalam pelaksanaan kegiatan survelen saling berkoordinasi dan mengevaluasi output tertinggi SKHI. Belum memenuhi SNI ISO 17020 klausul 5.2.2 **Status** : Memenuhi **Kategori ketidaksesuaian**: 2 **Klausul ketidaksesuaian** : 5.2.2	No.	Tgl Verifikasi	Tgl Perbaikan	Hasil Verifikasi
	1.	19/09/2024	19/09/2024	VTP 1: Memenuhi
3. Asesor: Prof.Dr. Sugeng Heri Suseno, S.Pi, M.Si Lembaga inspeksi harus memiliki tentang tugas dari setiap posisi dalam organisasi. Tetapi dalam surat penugasan B.206/BKIPM-AMB/KM.300/II/2024 tidak tergambar jelas terkait dengan tugas dan wewenang kasubag pengendalian dan kasubag pengawasan. Belum memenuhi SNI ISO 17020 klausul 5.2.7 **Status** : Memenuhi **Kategori ketidaksesuaian**: 2 **Klausul ketidaksesuaian** : 5.2.7	No.	Tgl Verifikasi	Tgl Perbaikan	Hasil Verifikasi
	1.	19/09/2024	19/09/2024	VTP 1: Memenuhi

KAN

	No.	Tgl Verifikasi	Tgl Perbaikan	Hasil Verifikasi
4. Assessor: Prof.Dr. Sugeng Hari Suseno, S.Pi, M.Si Lembaga Inspektor harus menetapkan dan mendokumentasikan persyaratan kompetensi untuk semua personil termasuk persyaratan pendidikan, pelatihan, training dan pengetahuan teknis. Personil yang sudah menjanjat sorang inspektor mutu ada 6. Dengan jumlah klien ada 18 UPI. Rasio tersebut sudah cukup untuk kegiatan surveilan, tetapi 1. Kontinuja pengendalian belum ikut pelatihan 17020, pelatihan validasi uji, kalibrasi/cara pengukuran dan pengujian dan uji banding dan uji profisiensi 2. Kabag belum ikut pelatihan SNI 17020 dan SNI 17025 3. Personil Rini, R (Deputi Manajer administrasi), Adam B (Inspektor mutu), Lutfi F (Inspektor mutu), Edy N (Calon Inspektor mutu), Mustari S (Calon Inspektor mutu), Jurnedi L (inspektor mutu/PSK) belum mengikuti SNI ISO 17020 Belum memenuhi SNI ISO 17020 klausul 6.1.1 **Status :** Memenuhi **Kategori ketidaksesuaian:** 2 **Klausul ketidaksesuaian :** 6.1.1	1.	14/10/2024	10/09/2024	VTP 1: Belum Memenuhi karena belum ada bukti dari KKP terkait dengan pelatihan yang diusulkan VTP 2: Memenuhi
5. Assessor: Prof.Dr. Sugeng Hari Suseno, S.Pi, M.Si 1) harus memenuhi untuk kegiatan inspektor untuk kinerja yang mencakupi yang digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. 1) Dalam evaluasi kinerja F.6.2.1.4.6BKIPM untuk ketua tim, hasil evaluasi dengan kriteria baik dan cukup tidak menggambarkan kompetensi personil 2) Dalam observasi inspektor dalam hasil kesimpulan dijelaskan akan dilakukan penyampaian hasil observasi inspektor dan konsultasi prosedur surveilan HACCP, tetapi hasil observasi belum pernah ditindaklanjuti. Belum memenuhi SNI ISO 17020 klausul 6.1.5 **Status :** Memenuhi **Kategori ketidaksesuaian:** 2 **Klausul ketidaksesuaian :** 6.1.5	1.	28/09/2024	10/09/2024	VTP 1: Memenuhi

KAN

	No.	Tgl Verifikasi	Tgl Perbaikan	Hasil Verifikasi
6. Assessor: Prof.Dr. Sugeng Hari Suseno, S.Pi, M.Si 1) harus menyediakan fasilitas dan peralatan yang sesuai dan memadai, tetapi Termometer Tusuk Digital (Cetuk) rusak dan tidak ada cadangan yang digunakan untuk mengukur suhu pusat ikan beku. Sedangkan peralatan thermometer in frized masih lama digunakan tetapi tidak cocok untuk mengukur suhu pusat ikan. Belum memenuhi SNI ISO 17020 klausul 6.2.1 **Status :** Memenuhi **Kategori ketidaksesuaian:** 2 **Klausul ketidaksesuaian :** 6.2.1	1.	28/09/2024	10/09/2024	VTP1: Memenuhi
7. Assessor: Prof.Dr. Sugeng Hari Suseno, S.Pi, M.Si 1) personil/petugas/ahli kegiatan dari inspektor kapada substantivik serta menjaga kompetensi, tetapi dalam kontrak belum dijelaskan ruang lingkup yang dikerjasamakan pada sub kontrak no. 1117/Mat/I/02/020 antara BKIPM Ambon dan BKIPM Manado yaitu uji logam berat dan kalsium. Belum memenuhi SNI ISO 17020 klausul 6.3.1 **Status :** Memenuhi **Kategori ketidaksesuaian:** 2 **Klausul ketidaksesuaian :** 6.3.1	1.	14/10/2024	10/09/2024	VTP 1: Pernyataan analisis penyebab tidak dapat diterima masih mengalang temuan. Pernyataan koreksi dan tindakan korektif dapat diterima yoriu bukti sudah memenuhi. VTP 2: Memenuhi
8. Assessor: Prof.Dr. Sugeng Hari Suseno, S.Pi, M.Si 1) harus menggunakan metode dan prosedur inspektor yang ditetapkan. (1) Dalam kegiatan surveilen ditetapkan adanya official control terdiri dari 3 orang berdasarkan SK.02/BKIPM Ambon, tetapi dalam dokumen surveilen hanya ada 1 orang. (2) Belum ada SK tim khusus untuk Evaluasi Final Surveilen dan Pencetakkan SHHS Tidak sesuai dengan pandoan SNI ISO 17020 butir 7.1.1 **Status :** Memenuhi **Kategori ketidaksesuaian:** 2 **Klausul ketidaksesuaian :** 7.1.1	1.	14/10/2024	10/09/2024	1) akses artinya kata mas dikerjakan, belum dikerjakan, tetapi bukti koreksi dan tindakan korektif dapat diterima. bukti sudah cukup. VTP 2: Memenuhi

	No.	Tgl Verifikasi	Tgl Perbaikan	Hasil Verifikasi
9. Auditor: Prof.Dr. Sugeng Hari Suseno, S.Pi., M.Si Pengamatan yang diperoleh dalam inspeksi harus dicatat secara tepat waktu untuk menyoroti kelengkapan informasi yang relevan. Dalam catatan teknis pelaksanaan survailen penerapan UPI dalam keterangan tidak didukung data primer mutu, pengukuran suhu, kadar klorin serta catatan yang mendukung kegiatan inspeksi. Tidak sesuai dengan persyaratan SNI ISO 17020 butir 7.1.7 **Status :** Memenuhi **Kategori ketidaksesuaian:** 2 **Klausul ketidaksesuaian :** 7.1.7	1.	26/09/2024	10/09/2024	VTP 1: Memenuhi
10. Auditor: Prof.Dr. Sugeng Hari Suseno, S.Pi., M.Si Pekerjaan yang dilaksakan harus terbukti. Dalam cheklist pengisian ketidaksesuaian oleh inspektur mutu hanya yang ada lampiran yang diberikan penjelasan, tetapi yang sesuai tidak ada penjelasan secara rinci hanya di beri ceklis. Tidak sesuai dengan persyaratan SNI ISO 17020 butir 7.4.1 **Status :** Memenuhi **Kategori ketidaksesuaian:** 2 **Klausul ketidaksesuaian :** 7.4.1	1.	26/09/2024	10/09/2024	VTP 1: Memenuhi
11. Auditor: Prof.Dr. Sugeng Hari Suseno, S.Pi., M.Si Ll harus menetapkan prosedur untuk mengendalikan dokumen internal dan eksternal. -ii Daftar milik internal milik ada, tetapi terkait dengan dokumen eksternal belum ada b) Acuan normatif belum update contohnya peraturan Badan Karantina Indonesia no 45 tahun 2023 dan peraturan presiden no 38 na tahun 2023 terkait KKP Tidak sesuai dengan: SNI ISO 17020 butir **Status :** Memenuhi **Kategori ketidaksesuaian:** 2 **Klausul ketidaksesuaian :** 8.3.1	1.	26/09/2024	10/09/2024	VTP1: Memenuhi

	No.	Tgl Verifikasi	Tgl Perbaikan	Hasil Verifikasi
12. Auditor: Prof.Dr. Sugeng Hari Suseno, S.Pi., M.Si Ll harus menetapkan waktu retensi dan pemusnahan rekaman. Manajer Administrasi mengkoordinir pelaksanaan pemusnahan sesuai Berita Acara pemusnahan dokumen (PM/7.5.5/BKIPM) dengan selisih kurangnya 2 tahun, tetapi belum diatur terkait dengan dokumen yang mempunyai nilai seperti izinnh dan sertifikat. Tidak sesuai dengan SNI ISO 17020 butir 8.4.1 **Status :** Memenuhi **Kategori ketidaksesuaian:** 2 **Klausul ketidaksesuaian :** 8.4.1	1.	26/09/2024	10/09/2024	VTP1: Memenuhi
13. Auditor: Prof.Dr. Sugeng Hari Suseno, S.Pi., M.Si Ll harus menetapkan sistim menejemen yang terencana dan efektif. Sudah ada contoh Target Kinerja selama 5 tahun 2020-2024 tetapi belum ada analisis SWOT yang menganalisikan kekuatan, tantangan, peluang dan kelemahan dalam menghadapi perubahan organisasi dan tantangan global dunia perikanan. Tidak sesuai dengan SNI ISO 17020 butir 8.5.1 **Status :** Memenuhi **Kategori ketidaksesuaian:** Observasi **Klausul ketidaksesuaian :** 8.5.1	1.	14/09/2024	10/09/2024	VTP1: pernyataan Auditi perpaduh belum dapat diterima, sedangkan korektif penyelesaian cadek bagus, dan perlu untuk sosialisasi kesekurah staf (perlu pemyataan dan bukti). BUKti SWOT sudah tersusun
Catatan VTP Oleh Auditor Kepala				

DATA DUKUNG PENERAPAN ISO 17025

FPA.06-0.02 Rev 2

KAN

LAPORAN RINGKAS DAN LEMBAR TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

Nama LPK : Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ambon
No. Akreditasi : LP-658-IDN
Standar Acuan : SNI ISO/IEC 17025: 2017 (ISO/IEC 17025:2017)
Tanggal Asesmen : 24/10/2024 - 24/10/2024

Tim Asesmen:		Tujuan Asesmen	Jumlah Ketidaksesuaian
Sebutkan nama dan bagian personil dalam tim (Ketua tim,pemeriksa dan tenaga ahli)		Re Akreditasi	Kategori 1 : 0 Kategori 2 : 12 Kategori Observasi : 2
Nama	**Tugas dalam tim**		
Milla Septiana Wiyantin	Kepala		
Ekowati Chasanah	Anggota		

Ringkasan Temuan :

KAN

FPA.06-b.02 Rev.2

6	SNI ISO/IEC 17025: 2017 (ISO/IEC 17025:2017)	Formulir Permintaan Pengujian Sampel belum di update, masih menggunakan nama lama dan pengujian yang saat ini sudah tidak sesuai dengan ruang lingkup self declare Nama Assessor : Elowati Chusniah	7.1	2
7	SNI ISO/IEC 17025: 2017 (ISO/IEC 17025:2017)	a) IEM/004/BKIPM Ambon tentang pengujian Salmonella spp tidak sesuai (penggunaan media HE) dengan acuan yang digunakan SNI ISO 6579:2015 dan Diagram alir pang berada di lab (menggunakan BGA atau BSA sebagai media selective) ; b) Kurva Ita. metoda pengujian Salmonell sebaiknya divalidasi, bukan di verifikasi Nama Assessor : Elowati Chusniah	7.2	2
8	SNI ISO/IEC 17025: 2017 (ISO/IEC 17025:2017)	Tabel Hasil Uji Salmonella PT/8.9.7/BKIPM Ambon tidak mengakomodir hasil pada media HE ; dan tidak mencantumkan kesimpulan hasil pengujian Nama Assessor : Elowati Chusniah	7.5.1	2
9	SNI ISO/IEC 17025: 2017 (ISO/IEC 17025:2017)	Lab belum melakukan penghitungan dan mengevaluasi ketidakpastian ruang lingkup pengujian ALT dan E. coli, coliform Nama Assessor : Elowati Chusniah	7.6.1	2
10	SNI ISO/IEC 17025: 2017 (ISO/IEC 17025:2017)	a) Lab organoleptik telah melakukan pembuatan panelis baru untuk produk perikanan segar tetapi laporan masih belum disusun sebagaimana seharusnya laporan (tidak ada metoda, hasil, dan kesimpulan) ; b) Pemeliharaan panelis dan pembentukan panelis baru produk kering belum dilakukan ; c) Lab organoleptik belum melakukan pengujian produk strip dan bio diet 2023/2024 untuk tempang kering terakhir dilakukan pada 12 Januari 2023. Nama Assessor : Elowati Chusniah	7.7	2
11	SNI ISO/IEC 17025: 2017 (ISO/IEC 17025:2017)	1. Dalam daftar dokumen belum mencantumkan dokumen KAN yang wajib diacu seperti: KAN G dan KAN K. 2. Belum ada bukti alur dokumen untuk tahun 2024 dimana beberapa dokumen lab tidak sesuai dengan implementasi, contoh: formulir disposisi masih mencantumkan list audit yang sudah tidak di lab; prosedur audit internal masih mencantumkan deputi bidang. Nama Assessor : Hilda Septiana Wijaastri	8.2	2

Tanggal: 24 Oktober 2024

3 dari 4

Lampiran 7. **Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Tahun 2024**

Laporan skm

LAPORAN

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT

TRIWULAN IV
2024

Laporan SKM

Kata Pengantar

BPPMHKP Ambon sangat membutuhkan informasi secara terbuka dari pengguna jasa secara rutin dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan yang diberikan guna mewujudkan daya guna instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu BPPMHKP Ambon perlu melakukan survey terhadap kepuasan masyarakat/pelanggan yang didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Ruang lingkup survey ini tentang kepuasan pengguna jasa dalam memperoleh pelayanan di BPPMHKP Ambon dengan mengisi kuesioner. Pelaksanaan survey dan laporan survey ini masih perlu perbaikan kedepan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima.

Semoga laporan ringkas ini berguna bagi berbagai pihak khususnya seluruh pegawai BPPMHKP Ambon dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

Ambon, 06 Januari 2025

M. Hatta Arisandi, S.St.Pi., M.Si.

Laporan skm

Ringkasan

HASIL SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
BPPMHKP AMBON
PERIODE IV TAHUN 2024

1. DASAR ACUAN SURVEI :

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.92/MEN/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

- Keputusan Kepala BPPMHKP Ambon Nomor : B.0045/KPA-BKIPM.AMB/KP.340/I/2024 tertanggal 2 Januari 2024 tentang tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024.

2. MAKSUD :

Untuk mengukur dan mengetahui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh BPPMHKP Ambon yang merupakan Unit Pelayanan Publik Instansi Pemerintah.

3. TUJUAN :

- Dapat mengetahui Tingkat Kepuasan Masyarakat/Pengguna Jasa

- Dapat melakukan pengembangan dan peningkatan terhadap mutu layanan terhadap masyarakat/pengguna jasa Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

4. HASIL :

- Indeks Kepuasan Masyarakat/Pengguna Jasa terhadap pelayanan BPPMHKP Ambon untuk periode IV Tahun 2024 sebesar **100** %.
- Tingkat Kepuasan Masyarakat/Pengguna Jasa dengan nilai **"A" atau SANGAT BAIK**

BAB IV. Analisis Hasil SKM

4.1 Analisis Permasalahan/Kelemahan dan Kelebihan Unsur Layanan

Berdasarkan hasil pengolahan data terlihat pada Tabel 3, dapat terlihat dari unsur layanan yang diisi, antara lain;

1. Layanan Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, serta kualitas air dengan 3 (Tiga) responden memperoleh nilai rata-rata IKM sebesar 4 untuk nilai SKM sebesar 100 dengan Mutu Layanan A atau kategori Sangat Baik.
2. **Layanan Penerbitan Surat Persetujuan Muat (SPM)**, dengan 1 (Satu) responden memperoleh nilai rata-rata IKM sebesar 4 untuk nilai SKM sebesar 100 dengan Mutu Layanan A atau kategori sangat Baik. BPPMHKP Ambon dalam menyediakan Layanan Penerbitan Surat Persetujuan Muat (SPM) selalu berkomitmen dengan Janji Layanan yang memuat waktu layanan dan prosedur sehingga sesuai dengan waktu layanan yang ditetapkan berdasarkan Standar Pelayanan BPPMHKP Ambon Layanan Penerbitan Surat Persetujuan Muat (SPM) dengan waktu layanan 50 Menit
3. **Penerbitan Sertifikat Ekspor**, dengan 4 (empat) responden memperoleh nilai rata-rata IKM sebesar 4 untuk nilai SKM sebesar 100 dengan Mutu Layanan A atau kategori Sangat Baik. BPPMHKP Ambon dalam menyediakan layanan sertifikasi ekspor khusus Sertifikasi Mutu dengan waktu layanan 24 jam selama 7 hari tanpa mengenal hari libur karena BPPMHKP

Laporan skm

BAB VI. Kesimpulan

1. Dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat BPPMHKP Ambon terhadap pengguna jasa pada Triwulan IV Tahun 2024 yang dilaksanakan pada Bulan Oktober – Desember 2024 menggunakan Aplikasi SI SUSAN KKP, diperoleh hasil sebagai berikut;
   a. Jumlah responden sebanyak 8 (Delapan) orang;
   b. Layanan Jasa pengujian hama penyakit ikan karantina, mutu, dan keamanan hasil perikanan, memperoleh nilai IKM sebesar 4 untuk nilai SKM sebesar 100 dengan Mutu Layanan A atau kategori Sangat Baik
   c. Layanan Penerbitan Sertifikat Kesehatan Ikan Ekspor memperoleh nilai IKM sebesar 4 dengan nilai SKM sebesar 100 untuk mutu pelayanan Sangat Baik (A);
   d. Layanan penerbitan Surat Persetujuan Muat (**SPM**) memperoleh nilai IKM sebesar 4 dengan nilai SKM sebesar 100 untuk mutu pelayanan Sangat Baik (A);
   e. Pelaksanaan layanan publik di BPPMHKP Ambon untuk Triwulan IV Tahun 2024 secara umum mencerminkan tingkat kualitas yang Sangat Baik dengan nilai SKM sebesar 100 dengan mutu layanan Sangat Baik (A).
2. Evaluasi terhadap hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dapat segera ditindaklanjuti sehingga peningkatan pelayanan terhadap pelanggan/pengguna jasa segera tercapai dan terlaksana.

Ambon, 06 Oktober 2024

Mengetahui,
Kepala

Hatta Ardiandi, S.St.Pi., M.Si.

Lampiran 8. **Capaian Index Profesionalitas ASN Balai KIPM Ambon Tahun 2024**

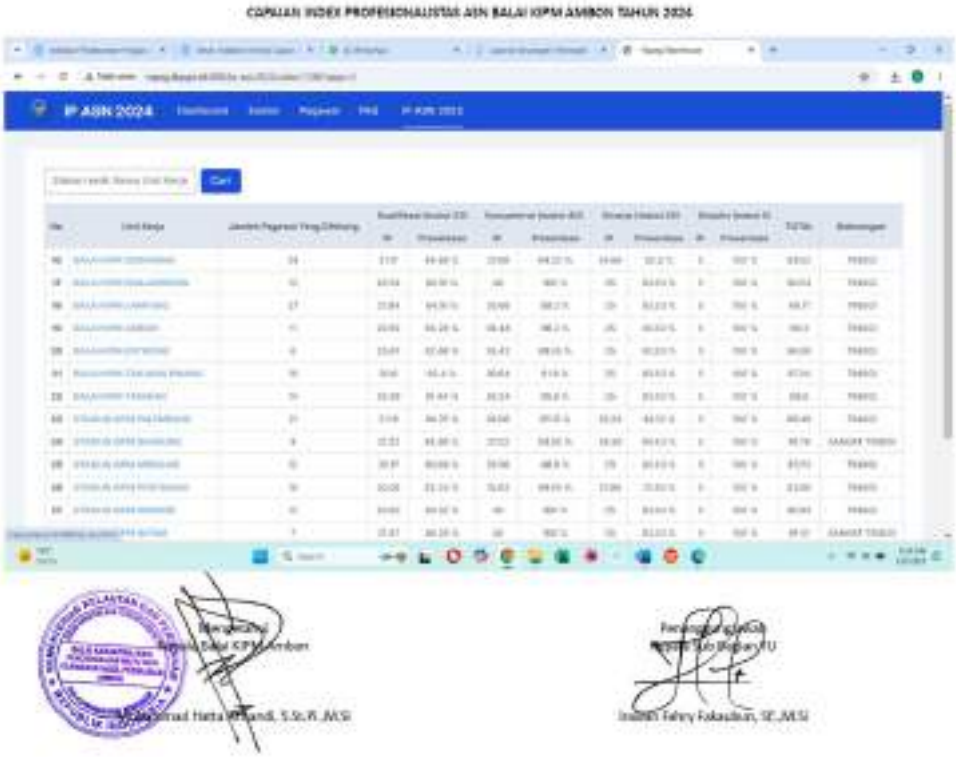

Lampiran 9. **Hasil Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2024**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

No.	Unit kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Akuntabilitas	Predikat
1	Sekretariat BPPMHKP	24.00	24.00	13.80	22.50	84.30	A
2	Pusat Manajemen Mutu	24.90	24.90	13.50	20.00	83.30	A
3	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Produksi Primer	27.30	24.00	11.25	20.50	83.05	A
4	Pusat Pengendalian dan Pengawasan Mutu Pascapanen	27.30	24.00	11.25	20.50	83.05	A
5	BBKIPM Jakarta I	22.80	24.00	13.50	22.50	82.80	A
6	BBKIPM Makassar	25.50	25.50	12.30	20.50	83.80	A
7	BKIPM Denpasar	24.00	23.10	13.50	22.50	83.10	A
8	BKIPM Surabaya I	24.00	22.20	13.50	22.50	82.20	A
9	BKIPM Medan I	22.20	24.00	13.50	22.50	82.20	A
10	BKIPM Balikpapan	24.00	24.00	12.75	21.25	82.00	A
11	BKIPM Jayapura	22.50	23.70	12.00	16.00	74.20	BB
12	BKIPM Jakarta II	23.70	23.70	13.50	21.25	82.15	A
13	BKIPM Surabaya II	24.00	25.50	11.10	22.50	83.10	A
14	BKIPM Mataram	24.00	27.00	12.60	20.00	83.60	A
15	BKIPM Manado	24.90	24.00	12.00	22.50	83.40	A
16	BKIPM Semarang	27.00	24.00	12.00	21.25	84.25	A
17	BKIPM Banjarmasin	23.10	24.30	13.50	22.50	83.40	A
18	BKIPM Lampung	22.20	27.00	13.50	20.00	82.70	A
19	BKIPM Ambon	27.00	24.00	12.75	20.00	83.75	A
20	BKIPM Entikong	22.20	24.60	13.50	22.50	82.80	A
21	BKIPM Tanjung Pinang	22.20	24.00	10.35	21.00	77.55	BB
22	BKIPM Tarakan	24.00	24.00	12.00	22.50	82.50	A
23	BUSKI PM	24.00	27.00	13.50	20.00	84.50	A
24	SKIPM Palembang	24.00	25.20	11.10	22.50	82.80	A
25	SKIPM Bandung	26.10	25.20	12.60	19.75	83.65	A
26	SKIPM Merauke	23.70	23.70	11.10	18.75	77.25	BB
27	SKIPM Pontianak	22.20	25.50	13.50	22.50	83.70	A
28	SKIPM Kendari	24.00	23.70	13.05	20.25	81.00	A
29	SKIPM Batam	25.50	25.50	10.35	21.00	82.35	A
30	SKIPM Padang	19.80	27.00	13.50	22.50	82.80	A
31	SKIPM Jambi	24.00	25.50	12.60	21.25	83.35	A
32	SKIPM Palu	24.00	24.00	12.60	22.50	83.10	A
33	SKIPM Palangkaraya	24.00	24.00	12.30	22.50	82.80	A
34	SKIPM Kupang	24.00	25.50	11.40	22.50	83.40	A
35	SKIPM Pangkal Pinang	24.00	25.50	11.40	21.25	82.15	A
36	SKIPM Ternate	22.20	27.00	12.60	22.50	84.30	A
37	SKIPM Yogyakarta	26.10	24.60	11.85	20.50	83.05	A
38	SKIPM Aceh	24.00	27.00	12.00	22.50	85.50	A
39	SKIPM Gorontalo	24.60	24.00	12.75	21.25	82.60	A
40	SKIPM Pekanbaru	22.80	27.00	12.60	22.50	84.90	A
41	SKIPM Medan II	25.20	24.00	12.60	22.50	84.30	A

No.	Unit kerja	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Nilai Akuntabilitas	Predikat
42	SKIPM Sorong	24.00	24.00	12.90	22.50	83.40	A
43	SKIPM Bengkulu	24.00	27.00	12.00	22.50	85.50	A
44	SKIPM Cirebon	24.00	27.00	12.00	22.50	85.50	A
45	SKIPM Luwuk Banggai	24.00	25.20	11.10	22.50	82.80	A
46	SKIPM Tanjung Balai Asahan	20.70	19.80	9.75	12.50	62.75	D
47	SKIPM Bima	22.29	24.00	12.00	22.50	81.30	A
48	SKIPM Tahuna	18.60	22.20	10.00	18.75	69.45	D
49	SKIPM Bau-Bau	24.00	24.30	12.15	21.00	81.45	A
50	SKIPM Merak	24.00	24.00	11.10	22.50	81.60	A
51	SKIPM Mamuju	27.09	24.00	11.10	18.50	80.60	A

3. Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas pencapaian indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP untuk Satker lingkup yang telah mencapai target (**≥82 Nilai**) yang telah ditetapkan pada tahun 2024.
4. Selanjutnya setiap satuan kerja (Pusat dan UPT) lingkup BPPMHKP , khususnya untuk 10 Satker dengan dibawah target (**≤82 Nilai**) diminta untuk melakukan perbaikan sesuai rekomendasi dan saran pada Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP dalam hal pengelolaan dan pelaporan kinerja agar dapat mencapai target indikator kinerja Penilaian Mandiri SAKIP periode Tahun 2025;
5. Rincian detail Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri SAKIP UPT lingkup BPPMKHP Tahun 2024 dapat dilihat pada aplikasi Kinerjaku masing-masing satker.

Demikian disampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan,

Ditandatangani Secara Elektronik

Hari Maryadi

Tembusan :
1. Kepala Badan Pengendalian Dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Lampiran 10. **Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tahun 2024**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sehubungan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan menyusuli Nota Dinas kami Nomor 4603/SJ.2/TU.210/XII/2024 tanggal 19 Desember 2024 hal Perpanjangan Waktu Pengisian Manual dan Realisasi Indikator Kinerja Perencanaan Program dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis TA 2024 bahwa Pengisian manual IKSS dan IKP tersebut dilakukan melalui Aplikasi SAKTI modul penganggaran yang sebelumnya dilakukan sampai dengan 20 Desember 2024 menjadi 15 Januari 2025, dengan ini kami sampaikan capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Triwulan IV TA 2024 sebagai berikut:

1. Capaian nilai Indikator Kinerja NKPA KKP (level 0) Triwulan IV tahun 2024 berdasarkan Aplikasi Monev Kemenkeu tanggal 15 Januari 2025 sebesar **87,18** dari target 82,00, untuk capaian nilai Indikator Kinerja NKPA Unit Eselon I (level I) sudah mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 81,00, sedangkan untuk capaian nilai Indikator Kinerja NKPA Satuan Kerja (level II) sebagian besar Satker telah mencapai target, tetapi terdapat beberapa Satker yang belum mencapai target sebesar 71,00.

Lampiran 11. **Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai KIPM Ambon Tahun 2024**

CAPAIAN INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN BALAI KIPM AMBON TAHUN 2024

Lampiran 12. **Capaian Indikator Kinerja Utama Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawasan Eksternal BPK tahun 2024**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1628/ITJ.0/TU.210/IX/2024

Yth. : 1. Para Kepala Biro lingkup Sekretariat Jenderal
2. Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi
3. Para Sekretaris Ditjen lingkup KKP
4. Para Sekretaris Badan lingkup KKP
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Capaian Indikator Kinerja Utama Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal (BPK RI) dari Total Realisasi Anggaran KKP
Lampiran : -
Tanggal : 30 September 2024

Bersama ini disampaikan bahwa Itjen KKP telah melaksanakan pengukuran IKU Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal (BPK RI), dengan hasil sebesar 0,0939% dengan target kurang dari 1%. Nilai tersebut diperoleh dengan membagi besarnya nilai keuangan terhadap besarnya realisasi anggaran. Adapun rincian capaian tersebut sebagaimana pada tabel berikut :

Rekapitulasi Tindak Lanjut Temuan Keuangan LK 2023 Lingkup KKP per 28 September 2024

No	Eselon I	Nilai Keuangan (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Setjen	571,218,611.00	631,795,951,055.00	0.0904%
2	Ditjen PKRL	175,999,847.00	199,297,824,561.00	0.0441%
3	Ditjen PSDKP	1,118,316,959.00	1,119,216,743,475.00	0.0999%
4	Ditjen Perikanan Tangkap	568,110,399.00	842,679,861,445.00	0.0674%
5	Ditjen Perikanan Budidaya	647,733,195.00	1,087,136,906,277.00	0.0596%
6	BPPSDMKP	1,832,712,563.00	1,342,846,268,763.00	0.1365%
7	Ditjen PDSPKP	998,491,792.00	339,604,537,406.00	0.2940%
8	BPPMHKP	11,350,000.00	497,626,943,467.00	0.0023%
9	Itjen	23,878,250.00	75,393,908,501.00	0.0317%
	Jumlah	5,947,811,618.00	6,335,595,925,317.00	0.0939%

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Ditandatangani Secara Elektronik

Ivy Sifra Irani

Tembusan:
1. Inspektur Jenderal
2. Sekretaris Jenderal

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE, BSSN

Penyelesaian Temuan BPK lingkup UPT Balai KIPM Ambon

No	Pegawai Tugas Belajar			Tempat Kuliah	Kelebihan Pembayaran 2023 (Rp)			
	Nama	NIP	Satker/ Unit Kerja		Gaji 2023	Tunjab 2023	Tunkin 2023	Jumlah 2023
1	2	3	4	5	10	11	12	13=10+11+12
1	Dodo Firmansyah	198403202010 15031001	Balai KIPM Lampung	Politeknik AUP Jakarta (dalam negeri)	-	2,520,000	-	2,520,000
2	drh. Adki Dharmawan	198306212010 10121001	Balai KIPM Manado	Chulalongkorn University (LN)	-	2,590,000	-	2,590,000
3	Cahyo Prio Koncoro, A.Md.Pl	198401071010 15031001	Stasiun KIPM Tahuna	Politeknik AUP Jakarta (dalam negeri)	-	2,590,000	-	2,590,000
4	Darul Aqsa	199907222 201503 1 001	Balai Besar KIPM Makassar	Politeknik AUP	-	1,800,000	-	1,800,000
5	Sumayani, S.Pi	198811228 200801 2 009	Balai KIPM Jakarta	Politeknik AUP	-	-	-	-
6	Seefuci r. A. Md. S.E	198704211 200901 1 001	Stasiun KIPM Cirebon	UNPAD	-	1,850,000		1,850,000
				Jumlah	-	11,350,000	-	11,350,000

Lampiran 13. **Presentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Balai KIPM Ambon Tahun 2024**

PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN YANG DIMANFAATKAN UNTUK PERBAIKAN KINERJA
TRIWULAN IV TAHUN 2024

Mengetahui
Kepala BPPMHKP Ambon

Muhammad Yusa Arsandi, S.Si, PL.M.Si
NIP. 19800527 200312 1 001

Pengendali Teknis

Fawan Fahry Tilkadzur, SE.,MSi
NIP. 19761106 200602 1 002

Lampiran 14. **Penilaian Efektifitas Pengawasan dan Kepatuhan Pelaksanaan PBJ pada Balai KIPM Ambon**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAN www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

Nomor : B.519/ITJ.4/HP.660/XII/2024 10 Desember 2024
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pengawasan Lainnya dalam rangka Penilaian Efektifitas Pengawasan dan Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun 2024 lingkup BPPMHKP

Yth. Sekretaris BPPMHKP
di Jakarta

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan, Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan Pengawasan Lainnya dalam rangka Penilaian Efektivitas Pengawasan dan Kepatuhan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Tahun 2024 lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), sebagaimana Surat Tugas Inspektur Jenderal KKP Nomor B.485/ITJ.4/KP.440/XI/ 2024, tanggal 28 November 2024, dengan hasil sebagai berikut:

1. Penilaian Efektivitas Pengawasan PBJ Tahun 2024 lingkup BPPMHKP dilaksanakan pada tanggal 2 s.d. 6 Desember 2024, terhadap 3 (tiga) komponen, dan memperoleh **nilai 91,96%** dari maksimum 100%. Hasil penilaian tersebut telah melebihi target Indikator Kinerja (IK) 8 pada Perjanjian Kinerja (PK) Itjen KKP Tahun 2024 yaitu Tingkat Efektifitas Pengawasan PBJ Lingkup KKP, serta IK 7 pada PK Inspektorat IV Tahun 2024 yaitu Tingkat Efektifitas Pengawasan PBJ lingkup Mitra Inspektorat IV, dengan target masing-masing sebesar 82%. Rincian penilaian efektifitas pelaksanaan pengawasan PBJ disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Pengawasan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Kualitas Perencanaan Pengawasan	20	20,00
2	Kualitas Pelaksanaan Pengawasan	40	40,00
3	Nilai Rata-rata Tingkat kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP	40	31,96
	Hasil Penilaian	**100**	**91,96**

Rincian Lembar Kerja Penilaian pada Tabel 1 terdapat pada Lampiran 1.

2. Penilaian Tingkat Kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024 sebesar **84,34%** dari maksimum 100%. Nilai tersebut telah melebihi target pada PK BPPMHKP Tahun 2024, yaitu pada IK 28, dengan target 80%. Rincian penilaian kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Tingkat Kepatuhan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024

No	Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Ketersediaan Manajemen Risiko PBJ Strategis BPPMHKP	10	10,00
2	Perencanaan dan Persiapan Pengadaan	15	13,75
3	Persentase Pemilihan PBJ yang Dilaksanakan melalui Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE)	10	10,00
4	Kesesuaian Tahap Pelaksanaan	45	31,84
5	Laporan Penyelenggaraan PBJ	5	3,75
6	Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil pengawasan PBJ lingkup BPPMHKP pada Triwulan I s.d. III Tahun 2023	15	15,00
	Hasil Penilaian	**100**	**84,34**

Rincian Lembar Kerja Penilaian pada Tabel 2 terdapat pada Lampiran 2.

Meskipun telah melebihi target IK pada PK, namun berdasarkan penilaian lebih lanjut terhadap pelaksanaan PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024, diketahui hal-hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. **Belum seluruh paket PBJ diumumkan dalam SIRUP**

   Rencana PBJ yang telah di-*input* pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) per Triwulan III Tahun 2024 hanya 2.777 Paket PBJ, senilai Rp184.082.331.000, atau 99,32% dari total 2.788 Paket PBJ yang harus di-*input* di SIRUP senilai Rp185.343.009.000,00.

2. **Terdapat keterlambatan penyelesaian pengadaan dan pembayaran**

   a. Belanja Modal

   Terdapat 2 (dua) paket PBJ senilai Rp256.777.989,00, dari total 14 paket PBJ senilai total Rp2.020.603.696,00 yang terlambat penyelesaian pekerjaannya dan belum terdapat realisasi pembayaran pada periode akhir tugas Tim, per tanggal 6 Desember 2024. Kontrak dimaksud, yaitu:

   1) Kontrak Nomor B.01.12/PPK/BKIPM.JKTII/PL.410/XI/2024 untuk Pengadaan Alat Pengolah Data pada Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan (KIPM)/PPMHKP Padang senilai Rp85.943.000,00 yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Pratama Solusindo, dengan periode akhir kontrak pada tanggal 29 November 2024; dan

2) Kontrak Nomor B.01.12/PPK/BKIPM.JKTII/PL.410/XI/2024 untuk Pengadaan Alat Pengolah Data senilai Rp161.180.000,00 yang dilaksanakan oleh PT. Cipta Pratama Solusindo, dengan periode akhir kontrak pada tanggal 29 November 2024.

b. Belanja Barang/Jasa

Terdapat 1 (satu) paket PBJ senilai Rp120.900.000,00, dari total 95 paket PBJ senilai total Rp10.612.011.998,00, yang terlambat pembayarannya pada periode akhir tugas Tim, per tanggal 6 Desember 2024. Kontrak dimaksud bernomor B.216.C/PPK-BPPMHKP.3/PL.420/XI/2024 untuk Pekerjaan Pengadaan Jasa *Fullboard* oleh PT. Citra Cikopo Hotel, dengan periode akhir kontrak pada tanggal 26 November 2024.

Rincian PBJ (Belanja Modal dan Belanja Barang/Jasa) dapat diakses pada: https://docs.google.com/document/d/1xNYHbqXt8JkJo7qP4ESb5RQJga0lQcuh/edit?usp=sharing&ouid=101593255689536754273&rtpof=true&sd=true.

3. **Belum seluruh hasil pengadaan sesuai *volume***

Berdasar hasil pengawasan Itjen KKP terhadap PBJ lingkup BPPMHKP Tahun 2024, diketahui terdapat kekurangan *volume* hasil PBJ, yaitu:

a. Pada Balai KIPM/PPMHKP Semarang, sesuai Surat Tugas Nomor B.359/ITJ.4/KP.440/X/2024, tanggal 22 Oktober 2024, terdapat Pekerjaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sesuai Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 014/PPK.BKIPM.SMG/SPK/PL.420/VII/2024, tanggal 25 Juli 2024 senilai Rp47.307.201,89 oleh penyedia CV. Bangun Jaya, dengan kekurangan *volume* senilai Rp4.055.472,00;

b. Pada Stasiun KIPM/PPMHKP Palangkaraya sesuai Surat Tugas Nomor B.456/ITJ.4/KP.440/XI/2024, tanggal 21 November 2024, terdapat:

1) Pemeliharaan Kantor (perbaikan *plafond* dan dinding) sesuai SPK Nomor 126/KPA/PL.420/SKIPM.PKY/II/2024, tanggal 26 Februari 2024, senilai Rp14.430.000,00 oleh CV. Tata Bangun Konstruksi, dengan kekurangan volume senilai Rp913.000,00; dan

2) Pemeliharaan Halaman Kantor (Perbaikan Lantai Teras Depan Kantor) sesuai SPK Nomor 206/KPA/SKIPM.PKY/PL.420/IV/2024, tanggal 30 April 2024, senilai Rp10.295.250,00, oleh CV. Seribu Dinar, dengan kekurangan *volume* senilai Rp875.000,00.

4

Berdasarkan konfirmasi dengan Analis Perencanaan, serta Ketua Tim Kerja (Katimja) Keuangan, Barang Milik Negara (BMN) dan Pengendalian Internal (PI) pada Sekretariat BPPMHKP, belum seluruh paket PBJ diumumkan dalam SIRUP dikarenakan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Satuan Kerja (Satker) lingkup BPPMHKP belum melakukan revisi RUP secara berkala setelah dilaksanakan revisi anggaran. Sedangkan keterlambatan pekerjaan dan kekurangan volume pekerjaan terjadi karena kekurangcermatan KPA dan PPK dalam mengendalikan kontrak.

Berdasarkan hal tersebut, direkomendasikan kepada Saudara agar menginstruksikan tertulis, kepada:

1. Seluruh KPA Satker lingkup BPPMHKP agar tertib dalam mengumumkan rencana pengadaan pada SIRUP dan menyelesaikan PBJ sesuai kontrak/surat pesanan tepat waktu; dan
2. PPK pada Stasiun KIPM/PPMHKP Palangkaraya dan Balai KIPM/PPMHKP Semarang agar cermat dalam mengendalikan kontrak dan segera menindaklanjuti rekomendasi Itjen KKP terkait kekurangan *volume* pada hasil pengawasan PBJ.

Terhadap saran di atas, telah terdapat kesanggupan tindak lanjut pada Minggu ke-3 Desember 2024, sesuai Dokumen Hasil Penilaian dan Kesanggupan Tindak Lanjut yang ditandangani Katimja Keuangan, BMN dan PI per 4 Desember 2024 dan dapat diakses pada: https://drive.google.com/file/d/1DxozTWpFuUh-M6E8T_IPIUfXRvkOROnj/view?usp=sharing

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n Inspektur Jenderal
Inspektur IV,

Ditandatangani
Secara Elektronik

Lina Herlina

Tembusan:
1. Inspektur Jenderal
2. Inspektur II
3. Kepala BPPMHKP

Lampiran 15. **Hasil Penilaian Tingkat Efektifitas Pengelolaan BMN Tahun 2024**

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3522805, FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAN www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

Nomor : T.553/ITJ.4/HP.660/XII/2024 19 Desember 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Berkas
Hal : Hasil Penilaian Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN Tahun 2024 pada Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Yth. Sekretaris BPPMHKP
di Jakarta

Sesuai dengan Surat Tugas Inspektur Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor: B.486/ITJ.4/KP.440/XI/2024, tanggal 28 November 2024, Auditor Inspektorat IV telah melaksanakan Penilaian Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN TA 2024 Lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) TA 2024 pada tanggal 02 s.d. 06 Desember 2024. Bersama ini disampaikan hasil penilaian dimaksud, sebagai berikut:

1. Pengukuran Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN dilakukan terhadap kualitas pengelolaan BMN Unit Eselon I. Hasil pengukuran Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP TA 2024 memperoleh nilai **99** dari maksimum **100** dengan rincian sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

No	Komponen Yang Dinilai		Bobot (%)	Nilai
1	Kualitas Pengawasan		60	60
	a.	Kualitas Perencanaan Pengawasan	20	20
	b.	Kualitas Pelaksanaan Pengawasan	40	40
2	Kualitas Pengelolaan BMN Unit Eselon I/Mitra		40	39
Hasil Penilaian			**100**	**99**

2. Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP TA 2024 memperoleh nilai **97,5** dari maksimum **100**. Adapun rincian nilai disajikan pada tabel berikut:

No	Sub Komponen yang Dinilai	Bobot (%)	Nilai
1	Ketersediaan dan pemanfaatan dokumen Rencana Kebutuhan BMN (RKBMN) Tahun 2024	12,50	10,00
2	Usulan penetapan status penggunaan (PSP) BMN Tahun 2024	25,00	25,00
3	Usulan penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat	25,00	25,00
4	Ketersediaan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian BMN hasil pengadaan belanja modal Tahun 2023	25,00	25,00
5	Ketepatan penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan)	12,50	12,50
Hasil Penilaian		**100**	**97,50**

Uraian hasil pengukuran terhadap masing-masing komponen Kualitas Pengelolaan BMN Unit Eselon I BPPMHKP dapat dikemukakan sebagai berikut:

a. Unit Eselon I BPPMHKP telah menyusun RKBMN Tahun 2024. Adapun tingkat pemanfaatan RKBMN terhadap penyusunan RKAKL adalah sebesar 68,02%. Belum optimalnya pemanfaatan RKBMN khususnya dalam pemeliharaan BMN karena dalam pengalokasian anggaran diutamakan/diprioritaskan untuk BMN yang memerlukan pemeliharaan pada TA 2024;
b. Usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal yang sudah BAST sampai dengan Triwulan III tahun 2024 dari sebanyak 33 NUP telah diusulkan sebanyak 31 NUP atau mencapai 93,94%;
c. Usulan penghapusan untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebanyak 2.142 NUP dari total BMN Rusak Berat sebanyak 2.180 NUP atau sebesar 98,26%;
d. Hasil Pengadaan BMN Tahun 2023 (untuk Satker Pusat) sebanyak 27 NUP, seluruhnya telah dilengkapi dengan Berita Acara Pemakaian; dan
e. Laporan BMN TA 2023 dan Laporan BMN Semester I TA 2024 telah disusun dan disampaikan ke Sekretariat Jenderal c.q. Biro Keuangan dan BMN tepat waktu.

Uraian lengkap hasil pengukuran disajikan dalam lembar kerja pengukuran sebagaimana terlampir.

3

Sehubungan dengan hasil penilaian dan dalam rangka efektivitas pengelolaan BMN Lingkup BPPMHKP kepada Sekretaris BPPMHKP direkomendasikan agar:

1. Menginstruksikan kepada Ketua Tim Kerja Program dan Data untuk memanfaatkan RKBMN dalam penyusunan RKAKL terutama dalam mengalokasikan belanja pemeliharaan BMN; dan
2. Menginstruksikan kepada seluruh Satker Lingkup BPPMHKP untuk mengusulkan penetapan status penggunaan (PSP) BMN hasil pengadaan Tahun 2024 sesuai ketentuan yang berlaku, dan mengusulkan penghapusan untuk BMN dengan kondisi rusak berat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Inspektur Jenderal
Inspektur IV

Ditandatangani
Secara Elektronik

Lina Herlina

Tembusan:
1. Inspektur Jenderal
2. Kepala BPPMHKP